

Model Ekosistem Integritas Tripusat: Sintesis Bandura–Lickona untuk Internalisasi Nilai Antikorupsi Berbasis Karakter di Pendidikan Dasar

I Wayan Gede Griyawana¹, I Putu Windu Mertha Sujana², Sukadi³, I Wayan Budiarta⁴
^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Kode Pos: 81116
Email Korespondensi: griyawana@student.undiksha.ac.id

Received : 18-5-2026

Revised : 09-06-2026

Accepted : 19-06-2026

Published : 21-06-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak : Korupsi yang mengakar di Indonesia menuntut pendekatan pencegahan dari hulu melalui pendidikan karakter di sekolah dasar, tetapi implementasinya kerap terjebak pada hafalan kognitif dan terbentur hipokrisi keteladanan lingkungan. **Tujuan:** Studi ini bertujuan memetakan, menyintesis, dan menganalisis secara kritis literatur mutakhir mengenai internalisasi nilai antikorupsi berbasis karakter di pendidikan dasar, serta merumuskan kerangka konseptual yang lebih holistik. **Metode:** Penelitian menerapkan tinjauan pustaka kualitatif sistematis berpedoman pada PRISMA 2020, dengan analisis tematik enam fase terhadap 30 artikel bereputasi terbitan 2016–2026 yang telah lolos penilaian mutu MMAT. **Hasil:** Internalisasi beroperasi melalui tiga tema utama, yaitu integrasi kurikulum, habituasi dan keteladanan guru, serta inovasi media digital yang dipadukan dengan kearifan lokal. Secara teoretis, kerangka pendidikan karakter Lickona mendominasi perancangan desain instruksional, sedangkan Teori Pembelajaran Sosial Bandura lebih presisi menjelaskan kegagalan praktik akibat defisit keteladanan. Ditemukan pula tiga celah, yakni marjinalisasi nilai kesederhanaan, dominasi asesmen kognitif, dan lemahnya integrasi ekosistem sekolah, keluarga, dan komunitas. **Kebaruan:** Sebagai sintesis konseptual, kajian ini merumuskan "Model Ekosistem Integritas Tripusat" yang memadukan teori Bandura dan Lickona, disertai reorientasi poros nilai pada kesederhanaan sebagai penangkal keserakahan serta gagasan asesmen perilaku lintas ruang; model ini diposisikan sebagai kerangka kerja yang menuntut kesiapan ekosistem, bukan resep instan. **Riset lanjutan:** Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji model ini secara empiris, mengembangkan instrumen asesmen perilaku lintas ruang yang sah, serta menelaah prasyarat keberhasilan implementasinya pada konteks sekolah yang beragam.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Sekolah Dasar; Pendidikan Karakter; Kearifan Lokal; Internalisasi Nilai

Abstract: Endemic corruption in Indonesia demands an upstream preventive approach through character education in elementary schools, yet its implementation is often trapped in cognitive memorization and undermined by hypocrisy in environmental modeling. **Purpose:** This study aims to map, synthesize, and critically analyze recent literature on the character-based internalization of anti-corruption values in elementary education and to formulate a more holistic conceptual framework. **Method:** It employs a systematic qualitative literature review guided by PRISMA 2020, applying six-phase thematic analysis to 30 reputable articles published between 2016 and 2026 that passed MMAT quality appraisal. **Findings:** Internalization operates through three main themes: curriculum integration, habituation and teacher modeling, and digital media combined with local wisdom. Theoretically, Lickona's character education framework dominates instructional design, whereas Bandura's Social Learning Theory more accurately explains practical failures caused by modeling deficits. Three gaps emerge: the marginalization of the simplicity value, the dominance of cognitive assessment, and the weak integration of the school-family-community ecosystem. **Novelty:** As a conceptual synthesis, the study formulates a "Tri-Center Integrity Ecosystem Model" integrating Bandura and Lickona, with a value reorientation toward simplicity as an antidote to greed and a cross-context behavioral assessment; the model is positioned as a framework requiring ecosystem readiness rather than an immediate solution. **Future research:** Further studies are recommended to test the model empirically, develop valid cross-context behavioral assessment instruments, and examine the prerequisites for successful implementation across diverse school contexts.

Keywords: Anti-Corruption Education; Elementary School; Character Education; Local Wisdom; Value Internalization

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan kebangsaan yang serius karena tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menggerus fondasi moral kehidupan bernegara. Di Indonesia, korupsi telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena bersifat sistemik, terorganisasi, dan telah membudaya dalam berbagai lapisan birokrasi serta struktur sosial masyarakat (Fahmi dkk., 2021; Ishak, 2019). Selama beberapa dekade, upaya pemberantasannya lebih bertumpu pada pendekatan penegakan hukum dan penindakan di hilir. Pendekatan represif tersebut tetap diperlukan, tetapi sejumlah kajian menunjukkan bahwa ia belum cukup memutus regenerasi perilaku koruptif karena pada umumnya baru menjangkau pelaku setelah penyimpangan terjadi, bukan membenahi mentalitas yang melahirkannya (Yorman dkk., 2025). Keterbatasan inilah yang mendorong pergeseran paradigma ke arah pencegahan di hulu melalui pendidikan. Pendidikan di sini tidak diposisikan sebagai pengganti penegakan hukum, melainkan sebagai strategi komplementer yang bekerja pada akar pembentukan watak, yakni membangun integritas warga negara sejak dini (Ambarwati dkk., 2023). Dalam kerangka tersebut, sekolah dasar menempati posisi yang strategis karena masa kanak-kanak merupakan periode formatif ketika nilai, norma, dan kompas moral mulai diinternalisasi dan mengendap menjadi disposisi yang relatif menetap (Sakban dkk., 2025). Perlu ditegaskan bahwa internalisasi yang dimaksud bukanlah sekadar kemampuan

menghafal definisi nilai, melainkan proses ketika nilai dipahami secara kognitif, dihayati secara afektif, dan diwujudkan secara konsisten dalam perilaku sehari-hari. Karena itu, kegagalan menanamkan integritas pada fase formatif ini berisiko berlanjut menjadi deviasi perilaku di kemudian hari, mulai dari ketidakjujuran akademik seperti menyontek dan plagiarisme hingga penyalahgunaan wewenang pada usia dewasa (Aksinudin dkk., 2022). Dengan demikian, pendidikan dasar tidak cukup diposisikan sebagai medium transfer pengetahuan, melainkan harus difungsikan sebagai ruang pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, dan kesederhanaan secara afektif dan perilaku, sejalan dengan hakikat manusia Indonesia yang monodualistik dan monopluralistik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Sukadi & Budiarta, 2024; Zulaiha dkk., 2025).

Meskipun publikasi mengenai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, sintesis kritis terhadap literatur tersebut justru memperlihatkan sejumlah keterbatasan mendasar yang saling berkaitan, bukan sekadar variasi temuan yang berdiri sendiri. Pertama, secara epistemologis sebagian besar penelitian masih bertumpu pada penguatan dimensi kognitif dan sikap, yaitu pemahaman tentang apa itu korupsi dan mengapa ia salah (Nurwahyuni dkk., 2026; Suleman dkk., 2025). Persoalannya, kecenderungan ini menyiratkan asumsi yang keliru bahwa pengetahuan moral akan dengan sendirinya berujung pada perilaku berintegritas. Padahal, dalam kerangka Lickona, *moral knowing* hanyalah satu dari tiga komponen karakter; tanpa *moral feeling* dan *moral action*, pengetahuan tersebut berhenti sebagai wacana yang tidak menjelma menjadi tindakan. Asumsi ini pula yang memperkuat kebiasaan mengukur keberhasilan program melalui peningkatan skor kognitif *pre-test* dan *post-test* sebuah metrik yang sesungguhnya hanya menilai kemampuan menghafal definisi, bukan keteguhan berperilaku jujur ketika tidak ada pengawasan (Wingkolatin dkk., 2026; Yasmiati dkk., 2025). Dengan kata lain, literatur cenderung mengukur gejala yang mudah dikuantifikasi, bukan substansi karakter yang sebenarnya hendak dibentuk. Kedua, dan inilah yang paling paradoksal, kajian terdahulu cenderung mendesain intervensi pada satu latar tunggal, yakni di dalam sekolah, baik melalui integrasi kurikulum PPKn dan PAI maupun pembiasaan budaya sekolah (Anwar, 2021; Nanggala, 2020; Siswanti, 2017). Ironisnya, mayoritas kajian tersebut justru menyandarkan kerangka analisisnya pada Teori Pembelajaran Sosial Bandura yang menegaskan bahwa perilaku terbentuk melalui pengamatan lintas lingkungan. Di sinilah tampak inkonsistensi internal dalam literatur: secara teoretis ia mengakui determinisme resiprokal antara individu, perilaku, dan lingkungan, tetapi secara praktis ia memperlakukan sekolah seolah-olah ruang steril yang terisolasi dari rumah dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan keluarga dan komunitas umumnya hanya muncul sebagai imbauan normatif di bagian penutup, tanpa model integrasi yang operasional dan dapat diukur (Sakban dkk., 2025; Yorman dkk., 2025). Kelemahan ini bersifat fatal karena justru kontradiksi antara nilai yang diajarkan di kelas dan keteladanan yang disaksikan siswa di luar kelas yang paling sering menggagalkan internalisasi nilai (Fajar & Muriman, 2018; U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2026). Ketiga, dari sisi muatan

nilai, riset masih didominasi oleh penanaman kejujuran dan tanggung jawab, sementara nilai kesederhanaan nyaris terabaikan (Latifah dkk., 2026; Sakban dkk., 2025). Bias fokus ini bukan persoalan sepele, sebab secara kriminologis akar perilaku korupsi pada banyak kasus bukanlah ketidaktahuan akan pentingnya kejujuran, melainkan keserakahan dan tuntutan gaya hidup materialistis. Ketika kurikulum semata-mata menargetkan kejujuran, ia berisiko menanggulangi gejala permukaan sembari membiarkan akar psikologisnya tetap hidup. Adapun pemanfaatan media digital dan kearifan lokal memang memperkaya strategi pembelajaran sekaligus mendukung penguatan Profil Pelajar Pancasila (Mahmuddah & Junaidi, 2025; Sanjaya dkk., 2021; Suryaningsih dkk., 2023), tetapi inovasi-inovasi tersebut umumnya berhenti pada tataran metode penyampaian dan belum dirangkai ke dalam satu kerangka yang sekaligus menata ekosistem keteladanan dan mengukur perubahan perilaku lintas ruang. Ketiga keterbatasan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu persoalan yang sama, yaitu fragmentasi: literatur kaya akan strategi parsial, tetapi miskin model integratif yang secara simultan menautkan desain nilai, penataan ekosistem sosial, dan instrumen asesmen perilaku. Pada titik inilah kebutuhan akademik untuk merumuskan kerangka internalisasi yang lebih holistik menjadi semakin nyata dan mendesak.

Berpijak pada keterbatasan tersebut, kajian ini bertujuan memetakan, menyintesis, dan menganalisis secara kritis literatur mutakhir mengenai internalisasi nilai antikorupsi berbasis karakter di pendidikan dasar dengan menyandarkan analisis pada dua kerangka teoretis utama, yaitu Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura dan Kerangka Pendidikan Karakter (*Character Education Framework*) dari Thomas Lickona. Secara spesifik, celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi mencakup tiga hal: dominasi asesmen kognitif yang belum mampu mengukur perilaku integritas secara autentik, lemahnya model yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, dan komunitas secara operasional, serta marjinalisasi nilai kesederhanaan dalam desain pendidikan antikorupsi. Atas dasar itu, kontribusi konseptual (*novelty*) yang ditawarkan artikel ini mencakup tiga aspek: (1) reorientasi poros nilai dari hegemoni kejujuran menuju penegasan nilai kesederhanaan sebagai penangkal keserakahan; (2) sintesis teoretis Bandura-Lickona ke dalam kerangka yang disebut “Model Ekosistem Integritas Tripusat”; dan (3) gagasan asesmen perilaku lintas ruang (*cross-spatial behavioral assessment*) yang melibatkan sekolah, teman sebaya, dan keluarga. Untuk mengarahkan analisis, kajian ini berpijak pada tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana strategi internalisasi nilai antikorupsi pada pendidikan dasar terpetakan dalam literatur mutakhir?; (2) di antara kerangka Bandura dan Lickona, manakah yang lebih dominan dalam menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan internalisasi tersebut?; dan (3) celah penelitian apa yang masih terbuka serta kontribusi konseptual apa yang dapat dirumuskan untuk mengatasinya?

B. Kajian Teori

Untuk mengurai mekanisme kompleks mengenai bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat ditransmisikan oleh pendidik, diinternalisasi secara psikologis oleh peserta didik, dan pada akhirnya termanifestasi dalam bentuk tindakan nyata, kajian ini menyandarkan pisau analisisnya pada dua kerangka teoretis makro yang fundamental dan saling berdialektika: Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura dan Kerangka Pendidikan Karakter holistik dari Thomas Lickona.

Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura)

Albert Bandura, melalui *Social Learning Theory* yang kemudian direkategorisasi menjadi *Social Cognitive Theory*, mempostulatkan bahwa sebagian besar proses pembelajaran manusia, khususnya yang berkaitan dengan pemerolehan nilai dan moralitas, terjadi melalui proses observasi, peniruan (*imitation*), dan pemodelan (*modeling*) dalam sebuah konteks sosial yang interaktif (Nurwahyuni dkk., 2026). Bandura secara radikal mengkritik pendekatan behaviorisme ortodoks ala B.F. Skinner yang secara reduksionis menganggap perilaku manusia hanya dibentuk oleh stimulus eksternal dan respons secara mekanis melalui pengondisian operan. Sebaliknya, Bandura memperkenalkan konsep determinisme resiprokal triadik (*triadic reciprocal determinism*), sebuah kerangka yang menyatakan bahwa fungsi kognitif individu (termasuk keyakinan, ekspektasi, dan disposisi moral), pola perilaku, dan faktor lingkungan saling berinteraksi secara resiprokal dan memengaruhi satu sama lain secara dinamis (Sambu & Chiroma, 2020). Dalam spektrum diskursus pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dasar, teori Bandura memiliki daya eksplanatori dan relevansi yang luar biasa tajam. Anak-anak pada rentang usia sekolah dasar merupakan pengamat yang sangat ulung (*astute observers*). Skema kognitif dan pemahaman etis mereka tidak semata-mata dikonstruksi melalui buku teks atau ceramah di depan kelas, melainkan melalui pengamatan langsung terhadap apa yang dikonstruksi oleh figur otoritas di sekitar mereka dalam hal ini, guru, kepala sekolah, aparatur tenaga kependidikan, dan orang tua (Sakban dkk., 2025). Berdasarkan postulat Bandura, peserta didik secara terus-menerus memindai lingkungan mereka untuk menemukan model perilaku yang akan mereka asimilasi (Ugalde dkk., 1998). Jika seorang pendidik mengkhotbahkan nilai kejujuran dan integritas secara verbal di dalam kurikulum formal, namun di saat yang sama pendidik tersebut mempraktikkan favoritisme, memanipulasi waktu mengajar, menyalahgunakan dana Komite, atau melakukan kecurangan administratif yang kasat mata, maka peserta didik akan terjebak dalam disonansi kognitif yang akut. Teori Bandura memperingatkan bahwa dalam situasi disonansi struktural semacam ini, perilaku yang dimodelkan (*modeled behavior*) dalam praktik nyata memiliki probabilitas imitasi yang jauh lebih superior dibandingkan dengan instruksi verbal atau materi pedagogis tertulis (Fajar & Muriman, 2018). Oleh karena itu, teori ini secara fundamental menegaskan bahwa penciptaan lingkungan sekolah yang bersih, berintegritas,

serta keteladanan yang konsisten tanpa hipokrisi dari para pendidik merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan dalam proses internalisasi nilai antikorupsi (Purnaningtyas & Fauziati, 2022).

Lebih jauh, Bandura juga mengeksplorasi pentingnya konsep *vicarious reinforcement* sebuah proses psikologis di mana peserta didik belajar mengenai nilai etis dan konsekuensi dari suatu tindakan dengan cara mengamati penghargaan (kredit sosial) atau hukuman (sanksi sosial) yang diterima oleh individu lain di lingkungan mereka (Ugalde dkk., 1998). Dalam konteks pembiasaan nilai antikorupsi, misalnya melalui implementasi "Kantin Kejujuran" (sebuah model kantin nirkasir di mana siswa dididik untuk mandiri dalam membayar dan mengambil uang kembalian), mekanisme *vicarious reinforcement* bekerja secara optimal. Siswa yang mengamati temannya bertindak jujur dan kemudian mendapatkan apresiasi secara sosial maupun kultural akan secara intristik termotivasi untuk mereplikasi tindakan integritas tersebut (Mahardika dkk., 2025). Sebaliknya, jika perilaku manipulatif atau curang di dalam ekosistem sekolah tersebut dibiarkan terjadi tanpa adanya sanksi sosial yang tegas atau mekanisme korektif, maka perilaku koruptif berskala mikro tersebut akan ternormalisasi, melegitimasi gagasan di benak anak-anak bahwa pelanggaran moral dapat diterima selama tidak terdeteksi.

Kerangka Pendidikan Karakter (Thomas Lickona)

Jika teori Bandura berfokus pada *mekanisme sosial* mengenai bagaimana suatu perilaku diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, maka pemikiran Thomas Lickona memberikan *struktur pedagogis* dan arsitektur internal mengenai bagaimana pendidikan karakter harus dikonseptualisasikan dan didesain secara sistematis. Lickona (1991), dalam karyanya yang monumental, menegaskan bahwa karakter yang baik dan kokoh (*good character*) tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari tiga komponen psikologis hierarkis yang saling bertautan dan tidak terpisahkan: Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*), Perasaan Moral (*Moral Feeling*), dan Tindakan Moral (*Moral Action*) (Nurwahyuni dkk., 2026). Karakter yang sejati dan tahan uji terhadap intervensi koruptif tidak mungkin terbentuk secara utuh jika salah satu dari ketiga rantai konseptual ini terputus atau diabaikan dalam kurikulum.

1. *Moral Knowing* (Pengetahuan Moral)

Dimensi ini mewakili fondasi kognitif di mana peserta didik secara sadar diajarkan untuk memahami konsep-konsep moral, prinsip etika, dan nilai-nilai antikorupsi secara rasional. Di tingkat sekolah dasar, tahapan ini melibatkan indoktrinasi positif mengenai pemahaman ontologis tentang perbedaan mendasar antara hak milik pribadi dan hak milik orang lain, pengenalan terhadap substansi nilai kejujuran, serta kapasitas awal untuk membangun penalaran etis (*ethical reasoning*) ketika peserta didik dihadapkan pada dilema moral sederhana (Nurwahyuni dkk., 2026). Siswa diajak untuk secara sadar mengetahui apa makna korupsi dalam konteks

usia mereka (misalnya mencontek, berbohong, atau mencuri barang teman).

2. *Moral Feeling* (Perasaan Moral):

Dimensi afektif ini berfungsi sebagai jembatan katalisator antara ranah kognitif (pikiran) dan ranah konatif (tindakan). Peserta didik tidak hanya dituntut untuk mengetahui bahwa mencontek atau memanipulasi kebenaran itu secara definitif salah, tetapi mereka harus dikondisikan agar *merasa* bersalah, merasa malu, atau merasakan ketidaknyamanan emosional jika melanggar nilai tersebut. Di sinilah letak sentral penumbuhan empati, kecintaan terhadap kebenaran (*loving the good*), dan aktivasi suara hati nurani (*conscience*) (Izzati dkk., 2019). Dalam implementasi pendidikan antikorupsi, *moral feeling* dikonstruksi dengan membantu siswa menyadari dampak destruktif dari kecurangan yang mereka lakukan terhadap kerugian pihak lain, sehingga melahirkan simpati, kepedulian sosial (*caring*), dan komitmen afektif yang mendalam terhadap integritas (Nurwahyuni dkk., 2026).

3. *Moral Action* (Tindakan Moral):

Dimensi behavioral ini merupakan manifestasi puncak dan bukti empiris dari penyatuan pengetahuan dan perasaan moral. Lickona secara tegas menggarisbawahi bahwa moralitas harus bertransformasi menjadi kebiasaan refleksif (*habituation*) (Aprilia dkk., 2024). Pendidikan antikorupsi kehilangan relevansi esensialnya jika seorang siswa mampu memperoleh nilai akademik yang sempurna dalam ujian tertulis mata pelajaran Pendidikan Pancasila mengenai pentingnya integritas, namun dalam realitas sosial mereka dengan mudah memanipulasi laporan keuangan kelas atau menjiplak tugas kelompok. *Moral action* melatih kompetensi eksekusi, kemauan keras (*will*), dan pembiasaan untuk bertindak jujur secara konsisten meskipun subjek berada dalam situasi yang sangat menekan atau saat tidak ada pengawasan eksternal (Nurwahyuni dkk., 2026).

Pendidikan karakter komprehensif yang diadvokasi oleh kerangka Lickona menuntut transformasi institusi sekolah. Sekolah tidak boleh sekadar berfungsi sebagai agen birokratis untuk mentransfer pengetahuan kognitif, melainkan harus merevolusi dirinya menjadi komunitas moral yang peduli (*caring moral community*) (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Dalam komunitas moral semacam ini, nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan melalui seluruh saluran pedagogis yang tersedia: kurikulum formal di dalam kelas, artefak budaya sekolah, disiplin yang restoratif, keteladanan paripurna, dan ruang-ruang partisipasi demokratis (Sakinah & Bakhtiar, 2019).

Sintesis Paradigmatik: Interseksi Bandura dan Lickona

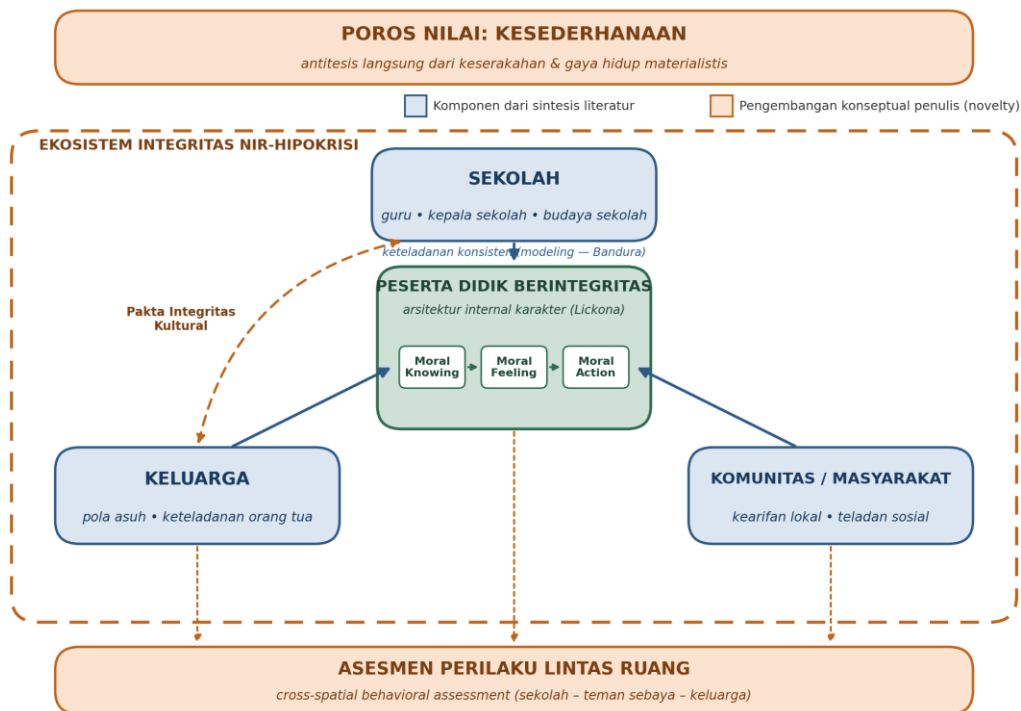
Secara epistemologis, integrasi antara pandangan struktural Lickona dan mekanisme sosiopsikologis Bandura menawarkan instrumen analisis yang sangat komprehensif untuk membedah literatur-literatur mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia. Kerangka Lickona menguraikan anatomi target (apa yang harus dibentuk dalam diri anak: kognisi, afeksi, dan aksi), sementara kerangka Bandura memetakan kondisi prasyarat sosiologis (bagaimana lingkungan eksternal harus ditata agar arsitektur karakter Lickona tidak runtuh akibat paradoks keteladanan). Kedua teori ini, bila ditautkan, menghasilkan sebuah postulat bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang paripurna di jenjang pendidikan dasar mensyaratkan adanya keselarasan absolut antara pesan moral yang dirancang secara kurikulum dan realitas tindakan yang dipraktikkan secara kultural oleh ekosistem pendidikan tersebut (Nurwahyuni dkk., 2026).

Konstruksi Kerangka Konseptual: Model Ekosistem Integritas Tripusat

Berdasarkan sintesis kedua teori di atas, kajian ini mengonstruksi sebuah kerangka konseptual yang disebut Model Ekosistem Integritas Tripusat sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Model ini berangkat dari premis bahwa pembentukan integritas tidak dapat dijelaskan oleh satu teori secara tunggal, melainkan oleh penggabungan dua mekanisme yang bekerja pada level berbeda. Pada level internal individu, kerangka Lickona berperan sebagai arsitektur karakter yang menjelaskan sasaran pembentukan, yaitu perpindahan dari pengetahuan moral (*moral knowing*) menuju perasaan moral (*moral feeling*) dan akhirnya tindakan moral (*moral action*) yang konsisten. Pada level eksternal, konsep *observational learning* dan determinisme resiprokal Bandura menjelaskan syarat sosial yang memungkinkan arsitektur tersebut benar-benar terbentuk, yakni adanya keteladanan yang konsisten dari figur-figur signifikan di sekitar anak. Dengan kata lain, Lickona menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dibentuk, sementara Bandura menjawab dalam kondisi sosial seperti apa pembentukan itu dapat berhasil. Mekanisme inilah yang menjadi dasar penataan tiga pusat lingkungan anak, yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas atau masyarakat, sebagai satu ekosistem keteladanan yang tidak boleh saling bertentangan (nir-hipokrisi).

Agar posisi kebaruan model ini jelas, perlu ditegaskan bagian mana yang bersumber dari sintesis literatur dan bagian mana yang merupakan pengembangan konseptual penulis, sebagaimana ditandai melalui kode warna pada Gambar 1. Komponen yang bersumber dari literatur (ditandai warna biru) mencakup tiga hal, yaitu arsitektur tiga ranah karakter Lickona, mekanisme pembelajaran sosial Bandura, serta keberadaan tiga pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan komunitas) yang selama ini telah diakui sebagai lingkungan pembentuk perilaku anak. Adapun komponen yang merupakan pengembangan konseptual penulis (ditandai warna oranye) terdiri atas empat hal: (1) penyatuan kedua teori ke dalam satu ekosistem integritas nir-hipokrisi yang mengondisikan keberhasilan kerangka Lickona pada konsistensi pemodelan lintas pusat ala Bandura; (2) penegasan kesederhanaan sebagai poros nilai yang menembus ketiga pusat; (3) gagasan pakta integritas kultural sebagai

instrumen pengikat komitmen keteladanan antara sekolah dan keluarga; serta (4) asesmen perilaku lintas ruang (*cross-spatial behavioral assessment*) sebagai mekanisme umpan balik yang memantau perilaku anak di ketiga pusat tersebut. Dengan demikian, model ini bukan sekadar penajaran dua teori, melainkan rekonstruksi yang menautkan desain nilai, penataan ekosistem sosial, dan instrumen asesmen ke dalam satu kerangka yang utuh. Elaborasi operasional dan justifikasi empiris setiap komponen dibahas lebih lanjut pada bagian Hasil dan Pembahasan.



Gambar 1. Model Ekosistem Integritas Tripusat

Sumber: konstruksi penulis berdasarkan sintesis Bandura dan Lickona (2026)

C. Metode Penelitian

Kajian literatur ini dirancang dan dilaksanakan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif secara sistematis. Alur kerja dalam proses pengumpulan, penyeleksian, dan analisis data diadaptasi secara ketat dari prinsip-prinsip pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 yang diaplikasikan untuk penelitian kualitatif (Page dkk., 2021). Pendekatan berbasis PRISMA ini sengaja diadopsi untuk meminimalisasi bias seleksi, menjamin transparansi proses ekstraksi data, dan memastikan bahwa instrumen sintesis hanya melibatkan literatur dengan validitas dan signifikansi ilmiah yang teruji, sehingga mampu merepresentasikan peta diskursus akademis yang autentik (Suwastika dkk., 2025).

Basis data yang dieksploitasi untuk menghimpun korpus literatur difokuskan pada platform pengindeks jurnal bereputasi tinggi, baik di tingkat nasional maupun

internasional. Pencarian utama difokuskan pada jurnal-jurnal akademik di Indonesia yang terakreditasi dalam Science and Technology Index (SINTA), dengan kualifikasi minimal peringkat SINTA 3 dan SINTA 2, serta pangkalan data global seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Suleman dkk., 2025). Strategi pencarian dioptimalkan dengan menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang meliputi namun tidak terbatas pada operan *Boolean*: ("Pendidikan Antikorupsi" OR "*Anti-Corruption Education*") AND ("Sekolah Dasar" OR "*Elementary School*" OR "*Primary Education*") AND ("Pendidikan Karakter" OR "*Character Education*") AND ("Internalisasi Nilai" OR "*Value Internalization*") AND ("Teori Bandura" OR "Teori Lickona") AND ("Kearifan Lokal" OR "*Local Wisdom*").

Proses seleksi literatur menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi dalam kajian ini mencakup: (1) Artikel yang diterbitkan secara resmi dalam jurnal ilmiah *peer-reviewed* terakreditasi nasional (SINTA 2/3) atau internasional bereputasi; (2) Publikasi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026) guna memastikan penangkapan wacana mutakhir, termasuk dinamika pasca-pandemi dan adaptasi implementasi Kurikulum Merdeka; (3) Fokus subjek penelitian secara spesifik menyoal pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah; (4) Kajian yang mengelaborasi aspek pedagogis, pendekatan internalisasi nilai, pemodelan perilaku, dan pembentukan karakter integritas. Sebaliknya, kriteria eksklusi ditetapkan untuk menyaring: (1) Artikel yang secara murni mendiskusikan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara legal-formal tanpa memuat intervensi dimensi pendidikan; (2) Artikel opini, tajuk rencana di media massa, atau tinjauan populer yang tidak melewati mekanisme tinjauan sejawat (*non-peer-reviewed*); (3) Penelitian yang berfokus secara eksklusif pada mahasiswa perguruan tinggi atau pendidikan menengah tingkat atas tanpa menyajikan benang merah relevansi dengan pendidikan dasar. Selain literatur utama, sejumlah referensi dari dokumen minor (misalnya prosiding konferensi spesifik yang dilampirkan) diintegrasikan dengan porsi yang sangat terbatas. Dokumen pendukung ini hanya difungsikan secara proporsional untuk mengontekstualisasikan wacana filosofis makro mengenai hakikat manusia Pancasila dan penggalian kearifan lokal di wilayah tertentu (seperti konsep dasar kemanusiaan di Bali) guna memperkaya triangulasi konsep (Sanjaya dkk., 2021).

Sebelum disintesis, mutu setiap artikel yang lolos uji kelayakan dinilai menggunakan *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) versi 2018 (Hong dkk., 2018). Instrumen ini dipilih karena mampu menilai beragam desain studi dalam korpus, baik kualitatif, kuantitatif deskriptif, maupun kuasi-eksperimental, melalui kriteria inti seperti kejelasan pertanyaan penelitian, kesesuaian desain, kememadaian dan kelengkapan data, serta ketepatan interpretasi temuan. Penilaian dilakukan secara independen oleh penulis, dan hanya artikel yang memenuhi sekurang-kurangnya empat dari lima kriteria mutu yang dipertahankan, sementara artikel dengan mutu metodologis lemah dieksklusi. Melalui

prosedur ini jumlah artikel menyusut dari 85 artikel hasil penyaringan menjadi 30 artikel utama. Dengan demikian, angka 30 bukan kuota yang ditetapkan di awal, melainkan konsekuensi dari penyaringan kelayakan dan penilaian mutu yang ketat, sekaligus tercapainya saturasi tematik, yaitu titik ketika penambahan artikel tidak lagi memunculkan tema atau pola baru yang substansial.

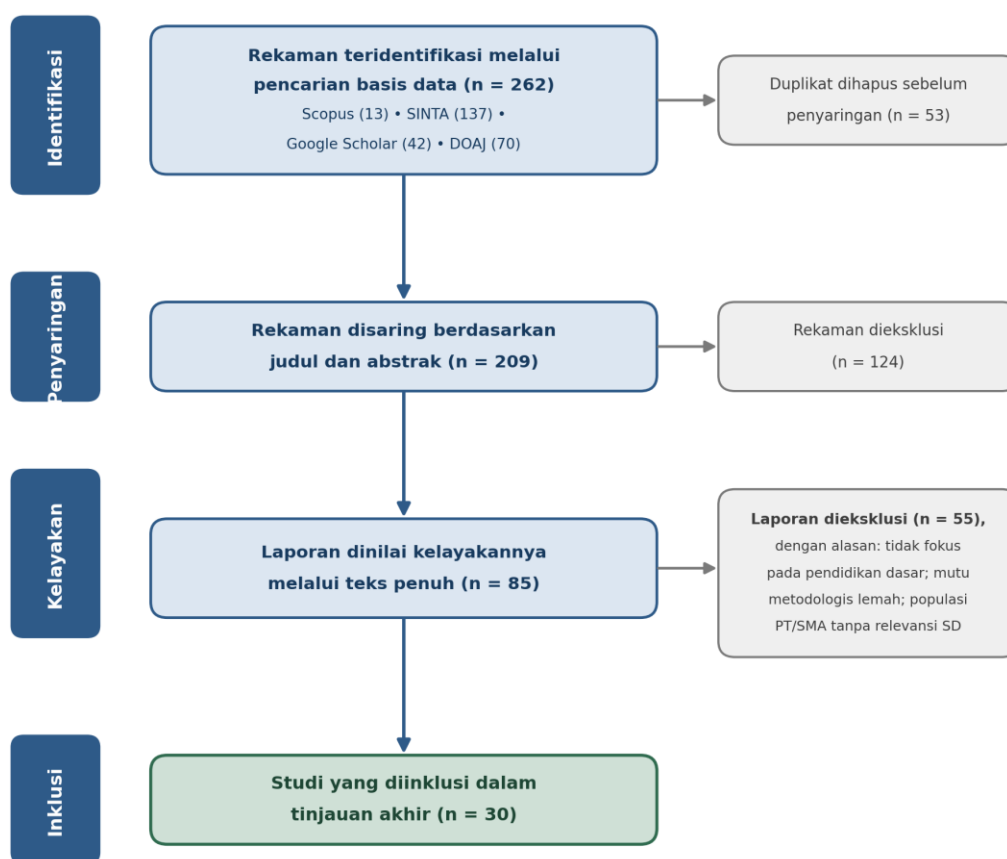
Data yang telah lolos uji kelayakan dan diekstraksi dari sekitar 30 artikel utama kemudian dianalisis menggunakan metode *Thematic Analysis* (Analisis Tematik) (Yorman dkk., 2025). Proses operasionalisasi analisis tematik ini melibatkan tahapan induktif dan deduktif yang terstruktur:

1. Reduksi Data: Melakukan pemilahan temuan-temuan empiris, pendekatan metodologi, rekomendasi pedagogis, dan argumen utama dari korpus teks setiap artikel yang diseleksi.
2. Pengkodean (*Coding*): Memberikan label konseptual secara sistematis pada fragmen data yang merefleksikan fokus penelitian. Kode-kode ini mencakup frasa seperti "Strategi Kurikuler Terpadu", "Kegagalan Pemodelan Guru", "Pemanfaatan Media Digital Interaktif", "Validitas Asesmen Perilaku", dan "Kesenjangan Teori Praktik".
3. Sintesis Tema: Mengaglomerasi dan merangkai kode-kode yang berkerabat ke dalam unit-unit tema makro. Tema-tema besar ini didesain untuk merefleksikan pola kesepakatan umum (*consensus*), friksi atau perdebatan diskursif, serta dominasi teoretis yang menonjol dalam konstelasi literatur.
4. Penarikan Kesimpulan: Mengonstruksi narasi analitis dan kritis yang secara tajam mengidentifikasi defisit pengetahuan (*research gaps*) dalam literatur eksisting, sekaligus menawarkan derivasi model konseptual baru sebagai klaim kebaruan ilmiah (*scientific novelty*).

Kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan dalam proses seleksi dirangkum pada Tabel 1, sedangkan keseluruhan alur penelusuran, penyaringan, dan penetapan studi yang diinklusi divisualisasikan dalam diagram alir PRISMA 2020 pada Gambar

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Studi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
(1) Artikel terbit pada rentang 2016–2026; (2) berfokus pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI); (3) membahas internalisasi nilai antikorupsi atau pendidikan karakter; (4) terpublikasi pada jurnal <i>peer-reviewed</i> (minimal terindeks SINTA 3) atau basis data bereputasi; (5) teks penuh tersedia dan lolos penilaian mutu MMAT (minimal empat dari lima kriteria).	(1) Kajian yang murni membahas aspek hukum pidana atau penindakan korupsi; (2) tulisan non-akademis seperti berita atau opini populer; (3) penelitian yang berfokus eksklusif pada mahasiswa perguruan tinggi atau pendidikan menengah atas tanpa relevansi dengan pendidikan dasar; (4) artikel dengan mutu metodologis lemah; (5) artikel duplikat.



Gambar 2. Diagram Alir Seleksi Studi Berdasarkan PRISMA 2020

Agar proses pembentukan tema dapat ditelusuri, analisis tematik dijalankan mengikuti enam fase Braun & Clarke (2006), mulai dari familiarisasi data, pengodean awal (*open coding*), pencarian dan peninjauan tema, hingga pelaporan yang bermuara pada sintesis konseptual. Tahapan tersebut beserta luarannya dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Analisis Tematik (mengikuti enam fase Braun & Clarke, 2006)

Fase	Aktivitas Analisis	Luaran
1. Familiarisasi data	Membaca berulang 30 artikel terpilih, membuat memo, dan mengekstraksi data kunci tiap artikel.	Ringkasan dan catatan analitis per artikel
2. Pengodean awal (<i>open coding</i>)	Pemberian kode konseptual pada fragmen data secara lintas artikel.	Kumpulan kode (mis. kegagalan keteladanan, asesmen kognitif, kearifan lokal)
3. Pencarian tema (kategorisasi)	Pengelompokan kode yang berkerabat menjadi kategori yang lebih luas.	Kategori awal
4. Peninjauan tema	Pengujian koherensi internal dan batas antartema; peninjauan silang antarpengarang.	Tiga tema utama yang stabil
5. Pendefinisian tema	Penamaan dan penajaman makna serta cakupan tiap tema.	Definisi operasional tema

Fase	Aktivitas Analisis	Luaran
6. Pelaporan dan sintesis konseptual	Penautan tema dengan teori (Bandura-Lickona) dan celah riset.	Narasi analitis dan Model Ekosistem Integritas Tripusat

Untuk menjamin keterpercayaan (*trustworthiness*) hasil sintesis, kajian ini mengacu pada empat kriteria Lincoln & Guba (1985), yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi antarpemulis, yaitu proses pengodean dan penetapan tema yang ditinjau silang oleh lebih dari satu pemulis untuk meminimalkan bias interpretasi tunggal, serta melalui diskusi penyelarasan (*peer debriefing*) ketika muncul perbedaan penafsiran. Transferabilitas didukung oleh deskripsi yang memadai mengenai karakteristik studi yang dikaji sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan pada konteks lain. Adapun dependabilitas dan konfirmabilitas dijaga melalui jejak audit (*audit trail*) berupa dokumentasi kata kunci pencarian, kriteria seleksi, hasil penilaian MMAT, serta tahapan pengodean sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 dan Tabel 2, sehingga keseluruhan proses dapat ditelusuri dan direplikasi oleh pemulis lain.

D. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

Pemetaan Tematik Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah menstandarisasi arsitektur nilai pendidikan antikorupsi dengan merumuskan sembilan nilai inti (*core values*) yang dikategorikan ke dalam tiga klaster: nilai inti (kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab), etos kerja (kerja keras, kemandirian, kesederhanaan), dan sikap (keberanian, keadilan, kepedulian) (Parmini dkk., 2024). Sintesis tematik terhadap literatur-literatur yang dikaji mendemonstrasikan bahwa proses desiminasi dan internalisasi kesembilan nilai tersebut di tingkat sekolah dasar beroperasi melalui tiga modus utama.

Karakteristik dan temuan utama studi yang dianalisis dirangkum pada Tabel 3, yang selanjutnya dielaborasi ke dalam tiga tema pada bagian berikut.

Tabel 3. Sintesis Karakteristik dan Temuan Utama Studi yang Dianalisis

No	Penulis (Tahun)	Fokus & Karakteristik Studi	Temuan Utama	Tema / Kontribusi
1	Pardini dkk. (2024)	Standardisasi nilai antikorupsi (kerangka KPK)	KPK merumuskan sembilan nilai inti antikorupsi dalam tiga klaster: nilai inti, etos kerja, dan sikap.	Kerangka nilai acuan internalisasi
2	Siswanti (2017)	Posisi mata pelajaran antikorupsi	Pendekatan mata pelajaran eksklusif berisiko membebani kognitif dan mereduksi moral menjadi hafalan.	Tema 1: dasar argumen integrasi
3	Anwar (2021)	Strategi pendidikan antikorupsi di SD	PPKn dan PAI berperan sebagai tulang punggung transformasi karakter.	Tema 1: integrasi kurikulum
4	Nanggala (2020)	Relevansi keilmuan PPKn	PPKn menyediakan ekosistem keilmuan paling relevan (hak-kewajiban, kesadaran hukum, keadilan sosial Pancasila).	Tema 1: integrasi kurikulum
5	Yasmiati dkk. (2026)	Kurikulum Merdeka / P5	P5 memberi fleksibilitas merancang pembelajaran berbasis proyek lintas disiplin yang kontekstual.	Tema 1: integrasi kurikulum
6	Sanjaya dkk. (2021)	Spiritualitas & kearifan lokal (satu Bali); kuasi-eksperimental	Integrasi agama mencegah sekularisasi moral; cerita rakyat lokal meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku secara signifikan.	Tema 1 & 3
7	Sujana dkk. (2025)	Tri Hita Karana dalam pendidikan kewarganegaraan	Sinergi nilai spiritual-kultural membentuk kesadaran etis dan karakter warga negara yang utuh.	Tema 1: integrasi kurikulum
8	Sari & Akhwani (2021)	Pembiasaan & ekstrakurikuler	Kantin Kejujuran dan Pramuka menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab melalui <i>learning by doing</i> .	Tema 2: habituasi & keteladanan
9	Aksinudin dkk. (2022)	Kantin Kejujuran	Kantin Kejujuran berfungsi sebagai laboratorium moral untuk mempraktikkan <i>moral action</i> .	Tema 2: habituasi & keteladanan
10	Yorman dkk. (2025)	Pembiasaan & sinergi tripusat	Hari Kejujuran dan pengawasan kolektif antarsiswa meningkatkan kesadaran integritas; keberhasilan bergantung pada sinergi sekolah, keluarga, dan komunitas.	Tema 2 & konsensus tripusat
11	Budiarta dkk. (2025)	Kebijakan pendidikan nonformal (PPWK)	Dukungan kebijakan pemerintah daerah krusial dalam mengakselerasi internalisasi nilai di ruang nonformal.	Tema 2: dukungan struktural
12	Mahmuddah & Junaidi (2025)	Media digital	Adopsi inovasi teknologi visual-interaktif memfasilitasi internalisasi nilai antikorupsi.	Tema 3: media digital
13	Benu dkk. (2025)	Aplikasi/animasi (Educandy, Si Kumbi); eksperimental	Multimedia meningkatkan atensi, retensi, dan proyeksi empatik saat menghadapi dilema moral visual.	Tema 3: media digital

No	Penulis (Tahun)	Fokus & Karakteristik Studi	Temuan Utama	Tema / Kontribusi
14	Suastika dkk. (2025)	<i>Local genius</i> dalam media digital	Integrasi kearifan lokal ke sumber belajar digital terbukti valid dan praktis merangsang atensi moral.	Tema 3: media digital & kearifan lokal
15	Hallatu (2023)	Kearifan lokal Suku Malind (Papua)	Nilai antikorupsi diinternalisasi melalui kearifan lokal dan <i>storytelling</i> .	Tema 3: kearifan lokal
16	Kertih dkk. (2021)	Kearifan lokal sebagai sumber belajar	Elemen riil kehidupan masyarakat dan kearifan lokal efektif sebagai sumber belajar kontekstual nilai moral.	Tema 3: kearifan lokal
17	Suleman dkk. (2025)	Urgensi internalisasi usia dini	Pendidikan antikorupsi harus dimulai sedini mungkin saat kompas moral anak terbentuk.	Konsensus akademis
18	Sakban dkk. (2025)	Akar korupsi & peran keluarga	Korupsi berakar pada keserakahan; konstruksi moral sekolah runtuh bila keluarga membenarkan perilaku koruptif/konsumtif; nilai kesederhanaan terabaikan.	<i>Research gap</i> : kesederhanaan & ekosistem keluarga
19	Yasmianti dkk. (2025)	Sistem & metrik asesmen	Evaluasi masih didominasi domain kognitif; perlu asesmen holistik (rubrik observasi, portofolio, peer assessment), meski sulit distandardisasi.	Perdebatan asesmen
20	Zulaiha dkk. (2025)	Profil integritas pendidik; kuantitatif	Kejujuran siswa kerap lebih baik secara statistik dibanding keteladanan pimpinan dan tenaga kependidikan sekolah.	Anomali keteladanan; dasar pakta integritas
21	U4 Anti-Corruption Resource Centre (2026)	Hipokrisi institusional sekolah	Siswa mengalami disorientasi etis saat menyaksikan toleransi atas kecurangan dan maladministrasi sekolah.	Friksi keteladanan
22	Fajar & Muriman (2018)	Pemodelan perilaku	Siswa merasionalisasi kecurangan mikro bila lingkungan memodelkannya tanpa sanksi berarti.	Dominasi Bandura: kegagalan <i>modeling</i>
23	Sambu & Chiroma (2020)	Determinisme sosial perilaku	Paradigma determinisme sosial Bandura menawarkan daya kritis lebih dominan dalam menjelaskan kegagalan internalisasi.	Dominasi Bandura
24	Nurwahyuni dkk. (2026)	Desain kurikuler Lickona & relasi keluarga-sekolah	Literatur memakai taksonomi Lickona sebagai blueprint RPP; rekayasa relasi ekosistem keluarga-sekolah masih lemah.	Dominasi Lickona; <i>research gap</i>
25	Latifah dkk. (2026)	Urutan KFA Lickona & bias nilai	Pembelajaran mengikuti urutan kognisi-afeksi-aksi; fokus riset didominasi nilai kejujuran dan tanggung jawab.	Dominasi Lickona; bias nilai
26	Wingkolatin dkk. (2026)	Instrumen evaluasi program	Evaluasi program banyak bergantung pada peningkatan skor <i>pre-test/post-test</i> kognitif.	<i>Research gap</i> : asesmen

No	Penulis (Tahun)	Fokus & Karakteristik Studi	Temuan Utama	Tema / Kontribusi
27	Izzati dkk. (2019)	Etika digital & ranah karakter	Tantangan etika digital (plagiarisme, pembajakan, budaya flexing) belum tergarap; terdapat perbedaan pada moral knowing, feeling, dan action.	<i>Research gap:</i> etika digital
28	Suwastika dkk. (2025)	Tinjauan sistematis peran pendidikan etika dan antikorupsi (desain: <i>systematic review</i>)	Pendidikan berperan strategis dalam membentuk integritas generasi muda; sekaligus menjadi rujukan pendekatan tinjauan sistematis berbasis PRISMA.	Landasan metodologis SLR & urgensi pendidikan bagi integritas
29	Sukadi & Budiarta (2024)	Kajian filosofis hakikat manusia Indonesia berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika	Manusia Indonesia dipahami secara monodualistik dan monopluralistik; identitas keindonesiaan berakar pada Pancasila dalam bingkai persatuan dalam keberagaman.	Landasan filosofis warga negara Pancasila (fondasi nilai integritas)
30	Suryaningsih dkk. (2023)	Pembentukan Profil Pelajar Pancasila (dimensi keberbinekaan global) melalui pendidikan multikultural di SD	Pendidikan multikultural di SD efektif membentuk dimensi keberbinekaan global pada Profil Pelajar Pancasila.	Tema 1 & penautan Profil Pelajar Pancasila

Tema 1: Integrasi Kurikulum sebagai Fondasi Sistemik Internalisasi Nilai Antikorupsi

Temuan literatur menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum merupakan strategi yang paling sering direkomendasikan karena memungkinkan pendidikan nilai berjalan secara sistemik, terencana, dan berkesinambungan di sekolah dasar, bukan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran eksklusif (*standalone subject*). Karena strategi eksklusif dinilai sarat dengan kelemahan karena berisiko membebani struktur kognitif siswa dan mereduksi esensi moralitas menjadi sebatas hafalan teoritis yang diujikan dalam lembar evaluasi (Siswanti, 2017). Integrasi ini umumnya dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penyisipan nilai pada mata pelajaran yang sudah ada (misalnya PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, dan Pendidikan Agama) serta penguatan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan pendekatan tersebut, nilai antikorupsi tidak diposisikan sebagai materi tambahan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pengalaman belajar harian yang melekat pada berbagai konteks pembelajaran. Dalam konteks ini, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Pendidikan Agama Islam (PAI) didaulat sebagai "tulang punggung" utama transformasi karakter (Anwar, 2021). PPKn menyediakan ekosistem keilmuan yang paling relevan karena berpusat pada dialektika hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum, dan keadilan sosial yang berlandaskan moralitas Pancasila (Nanggala, 2020). Lebih jauh, pergeseran kebijakan menuju Kurikulum Merdeka saat ini dilaporkan memberikan dorongan katalistik yang sangat positif. Melalui instrumen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), fleksibilitas yang diberikan memungkinkan para

guru merancang skenario pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang sifatnya lintas disiplin ilmu dan sangat kontekstual dengan pengalaman peserta didik (Yasmiati dkk., 2026). Nilai spiritualitas juga digaribawahi sebagai fondasi absolut yang tidak dapat direduksi; kajian menunjukkan bahwa integrasi landasan agama efektif mencegah sekularisasi pendidikan moral, dengan mengaitkan perilaku koruptif bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai dosa sosial dan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan (Sanjaya dkk., 2021). Sinergi yang kokoh antara nilai-nilai spiritualitas keagamaan kultural seperti adaptasi filosofi Tri Hita Karana ke dalam materi pendidikan kewarganegaraan terbukti esensial untuk membentuk kesadaran etis dan karakter warga negara yang utuh (Sujana dkk., 2025).

Agar integrasi kurikulum tidak berhenti pada level “memasukkan materi”, kerangka *Character Education* dari Lickona membantu menjelaskan sasaran pendidikan karakter yang seharusnya dicapai. Pada tahap awal, integrasi kurikulum terutama memperkuat dimensi *moral knowing*, yaitu ketika peserta didik memperoleh pemahaman konseptual mengenai nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian. Namun, literatur juga menegaskan bahwa pemahaman nilai belum otomatis membentuk karakter apabila tidak disertai penguatan dimensi *moral feeling* dan *moral action*. Oleh karena itu, integrasi kurikulum yang efektif perlu dirancang untuk mendorong peserta didik bukan hanya mengetahui definisi nilai, tetapi juga merasakan urgensi nilai tersebut (misalnya melalui empati, rasa bersalah ketika melanggar, dan dorongan hati nurani), lalu mempraktikkannya dalam tindakan yang konsisten. Dalam kaitannya dengan itu, penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, dan diskusi dilema moral dapat dibaca sebagai upaya menjembatani *moral knowing* menuju pembentukan disposisi dan tindakan. Ketika pembelajaran menggunakan teks, narasi, atau soal kontekstual yang menampilkan konflik kejujuran maupun tanggung jawab, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi konsekuensi sosial dari tindakan tidak jujur dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata di sekolah. Proses ini memperkuat *moral reasoning* sekaligus membuka ruang pengembangan aspek afektif (seperti empati terhadap pihak yang dirugikan), yang dalam kerangka Lickona merupakan prasyarat agar nilai benar-benar terinternalisasi dan tidak berhenti sebagai pengetahuan.

Dari perspektif Teori Pembelajaran Sosial Bandura, integrasi kurikulum juga bekerja melalui mekanisme pembelajaran sosial ketika materi ajar menghadirkan model perilaku yang dapat diamati dan ditiru. Tokoh dalam cerita, figur teladan dalam buku pelajaran, dan contoh praktik integritas yang diperlihatkan guru dalam pembelajaran dapat berfungsi sebagai *symbolic model*. Melalui proses *attention* (fokus pada perilaku model), *retention* (penyimpanan pola perilaku/penalaran moral), *reproduction* (pencobaan perilaku dalam situasi relevan), serta *motivation* (dorongan karena penguatan sosial dan hasil yang dinilai bernilai), nilai antikorupsi lebih mudah berpindah dari ranah kognitif ke ranah kebiasaan. Meski demikian, literatur mengindikasikan tantangan utama integrasi kurikulum: strategi

ini rentan menjadi formalitas apabila guru hanya menuliskan nilai dalam perangkat ajar tanpa menghidupkannya dalam interaksi pembelajaran dan budaya kelas. Di sinilah pentingnya konsistensi antara rancangan kurikulum, praktik pedagogis, dan iklim sekolah. Sejalan dengan Lickona, internalisasi karakter akan lebih kuat ketika sekolah membangun ekosistem yang memungkinkan peserta didik mengalami nilai secara nyata, misalnya melalui aturan kelas yang adil, transparansi penilaian, dan kesempatan berlatih tanggung jawab melalui peran-peran sederhana di kelas. Pada akhirnya, integrasi kurikulum dapat dipahami sebagai fondasi struktural yang menyediakan ruang bagi internalisasi nilai antikorupsi, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana integrasi tersebut mengaktifkan tiga ranah karakter (pengetahuan, perasaan, dan tindakan) sekaligus mengoperasionalkan mekanisme belajar sosial melalui keteladanan dan model simbolik. Dengan demikian, integrasi kurikulum yang berhasil bukan sekadar “memasukkan nilai” ke materi pelajaran, melainkan menata pengalaman belajar yang membuat peserta didik memahami, merasakan, dan mempraktikkan integritas secara bertahap dan konsisten.

Tema 2: Habitulasi dan Keteladanan Guru sebagai Mekanisme Utama Internalisasi

Selain mengandalkan silabus intrakurikuler, analisis literatur menyoroti signifikansi yang luar biasa dari pendekatan kultural yang difasilitasi melalui pembiasaan lingkungan. Model intervensi pembiasaan yang secara konsisten diteliti dan direkomendasikan oleh berbagai akademisi adalah pengadaan "Kantin Kejujuran" (Sari & Akhwani, 2021). Praktik Kantin Kejujuran dikonseptualisasikan bukan semata-mata sebagai fasilitas transaksi komersial, melainkan sebagai laboratorium moral mikrokosmos dari realitas sosiologis yang menuntut peserta didik mempraktikkan dimensi *Moral Action* (Aksinudin dkk., 2022). Inisiatif kultural lainnya seperti peringatan "Hari Kejujuran" (Honesty Day) serta penerapan sistem pengawasan kolektif antar-siswa juga terbukti secara empiris meningkatkan frekuensi kesadaran integritas harian (Yorman dkk., 2025). Selaras dengan hal tersebut, literatur juga menempatkan aktivitas ekstrakurikuler sebagai medium pedagogis yang sangat vital. Kegiatan kepanduan (Pramuka), misalnya, diakui secara luas memiliki efikasi tinggi dalam mengekstraksi dan menanamkan nilai-nilai ketangguhan, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab melalui pendekatan *learning by doing* dalam suasana yang komunal (Sari & Akhwani, 2021). Ekstrakurikuler menyediakan ruang peleburan hierarki akademis formal, di mana nilai-nilai altruisme, kepedulian komunal, dan kerja sama (gotong royong) dapat dihayati oleh siswa tanpa tekanan untuk mengejar metrik nilai numerik. Model pendidikan non-formal seperti Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di level daerah (seperti di Kabupaten Buleleng) juga menunjukkan tren positif, di mana pendidikan wawasan kebangsaan tidak hanya membendung radikalisme, tetapi juga memperkuat integritas identitas lokal (Sanjaya dkk., 2021). Dukungan strategis melalui kebijakan pemerintah daerah terhadap inisiatif institusi semacam ini terbukti sangat krusial dalam mengakselerasi internalisasi nilai-nilai karakter dan ideologi kebangsaan di ruang pendidikan non-formal (Budiarta dkk., 2025).

Dari sudut pandang Teori Pembelajaran Sosial Bandura, dominannya habituasi dan keteladanan dapat dijelaskan melalui mekanisme *observational learning*. Peserta didik belajar terutama melalui pengamatan terhadap figur signifikan (guru dan lingkungan sekolah), kemudian meniru perilaku tersebut ketika perilaku tampak “berhasil”, mendapat pengakuan, atau dipandang wajar dalam komunitas. Proses ini melibatkan tahapan *attention* (perhatian tertuju pada tindakan guru), *retention* (penyimpanan pola tindakan dan alasan moralnya), *reproduction* (pencobaan meniru dalam situasi relevan), dan *motivation* (dorongan karena penguatan berupa pujian, penerimaan sosial, atau rasa bangga). Dengan demikian, keteladanan bukan sekadar aspek etis, melainkan mekanisme pedagogis yang menentukan apakah nilai antikorupsi benar-benar dipelajari sebagai praktik sosial. Keteladanan guru menjadi krusial karena peserta didik usia sekolah dasar cenderung membaca nilai dari “apa yang dilakukan orang dewasa”, bukan hanya dari “apa yang dikatakan”. Ketika guru menekankan kejujuran tetapi menunjukkan toleransi terhadap kecurangan kecil, peserta didik menangkap pesan moral yang kontradiktif. Dalam kerangka Bandura, kontradiksi ini berpotensi melemahkan *motivation* untuk meniru perilaku berintegritas karena peserta didik melihat bahwa norma yang berlaku sebenarnya fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Oleh sebab itu, penekanan literatur pada peran role model pada dasarnya menegaskan bahwa konsistensi perilaku guru merupakan syarat agar proses belajar sosial bergerak ke arah integritas.

Kerangka Lickona memperkaya pembahasan habituasi dengan menegaskan bahwa pembiasaan yang efektif seharusnya mengembangkan tiga ranah karakter secara simultan. Habituasi memang tampak dominan menargetkan *moral action*, tetapi agar tidak menjadi rutinitas tanpa makna, habituasi perlu disertai penguatan *moral knowing* dan *moral feeling*. Program seperti “kantin kejujuran” atau pembiasaan mengembalikan barang temuan tidak cukup dioperasionalkan sebagai aturan; peserta didik perlu memahami alasan moralnya (mengapa kejujuran penting bagi kepercayaan bersama) dan merasakan dimensinya (rasa bersalah ketika tidak jujur, rasa bangga ketika jujur, dan empati terhadap pihak yang dirugikan). Jika ketiga ranah ini tidak berjalan seimbang, habituasi berisiko hanya menghasilkan kepatuhan sesaat karena pengawasan, bukan internalisasi nilai. Dalam konteks tersebut, peran guru tidak hanya sebagai model perilaku, tetapi juga sebagai fasilitator refleksi moral. Praktik seperti refleksi singkat atas kejadian harian di kelas, diskusi konsekuensi tindakan tidak jujur, dan umpan balik yang menekankan proses (bukan semata hasil) dapat memperkuat hubungan antara tindakan dan alasan moral. Hal ini sejalan dengan gagasan Lickona bahwa pendidikan karakter perlu membangun kebiasaan baik melalui latihan berulang, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan komitmen moral agar kebiasaan tersebut menjadi bagian dari identitas diri peserta didik.

Literatur juga menunjukkan tantangan penting: habituasi dapat kehilangan daya pendidikan ketika hanya bersifat seremonial atau ketika sekolah terlalu menekankan hukuman tanpa pembinaan makna. Dalam kerangka Lickona, penekanan berlebihan pada

hukuman berpotensi membentuk kepatuhan eksternal tanpa mengembangkan *conscience* dan *self-respect* sebagai fondasi motivasi internal. Sementara itu, dalam kerangka Bandura, iklim sekolah yang lebih banyak memberi penguatan pada hasil (misalnya nilai tinggi) daripada proses jujur dapat mendorong peserta didik meniru strategi “jalan pintas” yang tampak efektif. Karena itu, ekosistem penguatan di sekolah perlu diarahkan agar perilaku berintegritas dipandang sebagai perilaku yang bernilai, dihargai, dan membawa konsekuensi sosial positif. Dengan demikian, habituasi dan keteladanan guru dapat dipahami sebagai inti internalisasi nilai antikorupsi pada pendidikan dasar: ia bekerja melalui pembelajaran sosial (Bandura) dan pembentukan kebiasaan karakter yang utuh (Lickona). Strategi ini paling efektif ketika praktik harian di kelas dan budaya sekolah secara konsisten menampilkan model integritas, menyediakan ruang refleksi moral, serta menguatkan nilai melalui pengakuan sosial dan pengalaman bermakna, bukan semata aturan atau pengawasan.

Tema 3: Inovasi Media Digital dan Kearifan Lokal sebagai Wahana Internalisasi Nilai Antikorupsi

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat dasar. Literatur mutakhir secara agresif mengevaluasi adopsi inovasi teknologi visual dan interaktif dalam memfasilitasi internalisasi nilai antikorupsi (Mahmuddah & Junaidi, 2025). Berbagai penelitian eksperimental menelaah efektivitas aplikasi permainan daring (misalnya Educandy), penggunaan komik digital antikorupsi, hingga pemutaran serial animasi edukatif berseri seperti "Si Kumbi Anak Jujur" yang secara strategis diproduksi oleh KPK (Benu dkk., 2025). Di samping itu, integrasi pesona kearifan lokal (*local genius*) ke dalam inovasi sumber belajar berbasis digital dan multimedia interaktif juga terbukti sangat valid serta praktis untuk merangsang atensi moral peserta didik di era modern (Suastika dkk., 2025). Temuan empiris mengonfirmasi bahwa intervensi menggunakan instrumen multimedia ini secara radikal mampu meningkatkan atensi, retensi memori, serta memudahkan anak-anak dalam melakukan proyeksi empatik saat dihadapkan pada dilema moral visual (*ethical decision making*) (Benu dkk., 2025). Dalam kerangka Teori Pembelajaran Sosial Bandura, media digital dapat dipahami sebagai sarana *modeling* yang memungkinkan peserta didik mengamati, memproses, dan meniru perilaku moral melalui empat mekanisme utama, yakni *attention*, *retention*, *reproduction*, dan *motivation*. Konten digital yang menarik secara visual dan interaktif berpotensi memperkuat perhatian peserta didik terhadap pesan moral; sementara format naratif dan multimodal (visual, audio, teks) membantu penyimpanan representasi kognitif nilai integritas. Lebih lanjut, permainan edukatif, simulasi, dan aktivitas interaktif menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mencoba menerapkan pilihan moral, serta menerima penguatan melalui umpan balik atau penghargaan yang dirancang dalam pembelajaran.

Sejalan dengan itu, Kerangka Pendidikan Karakter Lickona menegaskan bahwa internalisasi nilai perlu menyentuh tiga ranah karakter secara simultan. Pada ranah moral knowing, media digital seperti video animasi, komik interaktif, dan modul digital memfasilitasi pemahaman konseptual peserta didik tentang bentuk-bentuk ketidakjujuran, konsekuensi sosial dari tindakan koruptif, serta alasan pentingnya integritas. Pada ranah moral feeling, narasi digital yang menampilkan dampak ketidakadilan pada pihak yang dirugikan dapat menumbuhkan empati dan kepekaan moral. Pada ranah moral action, fitur gamifikasi dan simulasi peran dapat memfasilitasi latihan pengambilan keputusan etis dan pembentukan kebiasaan perilaku berintegritas dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain media digital, literatur juga menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai pendekatan kontekstual dalam internalisasi nilai antikorupsi. Strategi rekontekstualisasi menggunakan kearifan lokal (local wisdom) juga diakui memiliki daya ungkit psikologis yang sangat presisi (Sanjaya dkk., 2021). Literatur mencatat bahwa transformasi cerita rakyat setempat, penggunaan fabel lokal, serta falsafah hidup komunitas adat seperti internalisasi nilai sembilan sikap antikorupsi melalui kearifan Suku Malind di Papua, atau pengejawantahan filosofi keseimbangan Tri Hita Karana serta kisah kepahlawanan historis (Puputan) melalui dongeng tradisional Satua Bali menjadi wahana penceritaan (*storytelling*) yang sangat tajam (Hallatu, 2023). Keberhasilan strategi rekontekstualisasi budaya ini tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga didukung oleh bukti empiris mutakhir dalam literatur pendidikan karakter di sekolah dasar. Sebagai contoh, sebuah studi kuasi-eksperimental mengonfirmasi bahwa pemanfaatan kearifan lokal khususnya medium cerita rakyat atau satua Bali dalam pembelajaran terbukti mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada dimensi pengetahuan, sikap (moral feeling), dan keterampilan perilaku siswa dibandingkan metode konvensional (Sanjaya dkk., 2021). Melalui penceritaan kisah-kisah tradisional yang sarat akan pesan filosofis, siswa tidak sekadar diindoktrinasi dengan aturan yang kaku, melainkan diajak untuk memproyeksikan empati dan tindakan moral. Dalam bingkai pendidikan antikorupsi, pendekatan naratif semacam ini menyediakan panggung simulasi yang presisi bagi anak untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dan anti keserakahan secara otentik. Metode ini terbukti brilian dalam mentransfer pesan moral organik tanpa memunculkan kesan birokratis atau menggurui, sehingga peserta didik lebih mudah menginternalisasi penolakan terhadap keserakahan egoistis dan egoisme materialistik (Sanjaya dkk., 2021). Praktik ini sejalan dengan temuan empiris yang membuktikan bahwa pemberdayaan elemen riil kehidupan bermasyarakat dan kearifan lokal sangat efektif dijadikan sumber belajar kontekstual untuk mendekatkan nilai moral ke dalam realitas anak (Kertih dkk., 2021).

Meskipun demikian, implementasi inovasi digital dan pendekatan kearifan lokal menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kualitas dan akurasi konten perlu dijaga agar model perilaku yang disajikan benar-benar mencerminkan nilai antikorupsi secara autentik, bukan sekadar hiburan tanpa substansi moral. Kedua, aspek etika digital menjadi

relevan ketika peserta didik berinteraksi dengan konten daring yang tidak selalu terkurasi; hal ini dapat memunculkan paparan terhadap model perilaku yang bertentangan dengan integritas. Ketiga, literatur juga mengindikasikan keterbatasan instrumen evaluasi yang mampu mengukur dampak media digital dan pendekatan kontekstual terhadap perubahan perilaku nyata (*moral action*), bukan hanya peningkatan pengetahuan (*moral knowing*). Dengan demikian, inovasi media digital dan pemanfaatan kearifan lokal berpotensi memperkaya internalisasi nilai antikorupsi apabila dirancang secara pedagogis dan terintegrasi dengan tujuan pendidikan karakter. Inovasi tersebut akan lebih efektif ketika secara sadar mengaktifkan mekanisme pembelajaran sosial (Bandura) sekaligus menguatkan tiga ranah karakter (Lickona), sehingga pembelajaran tidak hanya informatif, tetapi juga membentuk sensitivitas moral dan kebiasaan perilaku berintegritas.

Untuk menautkan temuan tematik dengan kerangka konseptual yang dibangun, Tabel 4 memetakan setiap tema dan subtema ke komponen Model Ekosistem Integritas Tripusat, sekaligus menampilkan tantangan dan potensi kegagalan implementasi pada tiap aspek.

Tabel 4. Pemetaan Tema-Subtema terhadap Komponen Model dan Tantangan Implementasi

Tema / Subtema (Hasil)	Temuan / Strategi Kunci	Komponen Model Ekosistem Integritas Tripusat	Tantangan / Kegagalan Implementasi
Tema 1: Integrasi nilai pada PPKn/PAI (bukan mata pelajaran tersendiri)	Nilai antikorupsi diintegrasikan secara sistemik ke mata pelajaran yang sudah ada, terutama PPKn dan PAI.	Pusat Sekolah (Bandura); penguatan <i>Moral Knowing</i> (Lickona)	Pendekatan eksklusif/kognitif mereduksi moral menjadi hafalan; pengetahuan tidak otomatis menjadi perilaku.
Tema 1: Pembelajaran berbasis proyek (P5) & integrasi spiritual-kultural	P5 Kurikulum Merdeka dan muatan agama/kearifan lokal memperkaya pembelajaran nilai yang kontekstual.	Pusat Sekolah; jembatan dari <i>Moral Knowing</i> menuju <i>Moral Feeling</i>	Implementasi P5 belum merata; integrasi nilai lokal sering berhenti pada metode, belum tertata sistemik.
Tema 2: Pembiasaan (Kantin Kejujuran, Hari Kejujuran)	Pembiasaan rutin melatih perilaku jujur dan tanggung jawab di ruang nyata sekolah.	<i>Moral Action</i> (Lickona); Pusat Sekolah	Pembiasaan rapuh tanpa keteladanan dan sanksi; siswa merasionalisasi kecurangan bila dibiarkan.
Tema 2: Keteladanan guru (pemodelan perilaku)	Guru sebagai model perilaku berintegritas menjadi kurikulum tersembunyi yang paling kuat terbaca siswa.	Pembelajaran observasional (Bandura); Ekosistem Integritas Nir-Hipokrisi	Anomali integritas guru/staf; hipokrisi institusional dan maladministrasi memicu disorientasi etis siswa.
Tema 2: Sinergi tripusat & dukungan kebijakan	Keberhasilan internalisasi bergantung pada sinergi sekolah, keluarga, dan	Pusat Keluarga & Komunitas (Bandura); Pakta Integritas Kultural	Pelibatan keluarga sering berhenti pada imbauan normatif; kontradiksi nilai keluarga-sekolah

Tema / Subtema (Hasil)	Temuan / Strategi Kunci	Komponen Model Ekosistem Integritas Tripusat	Tantangan / Kegagalan Implementasi
	komunitas serta dukungan kebijakan.		menggagalkan internalisasi.
Tema 3: Media digital interaktif (aplikasi, animasi)	Multimedia meningkatkan atensi, retensi, dan keterlibatan emosional terhadap dilema moral.	Penguat Moral Feeling (Lickona); media lintas pusat	Inovasi berhenti pada metode penyampaian; tantangan etika digital (plagiarisme, flexing) belum tergarap.
Tema 3: Kearifan lokal (satu Bali, Suku Malind, <i>local genius</i>)	Kearifan lokal menjadi sumber belajar kontekstual yang menumbuhkan penghayatan nilai.	Pusat Komunitas/Masyarakat; Poros Nilai Kesederhanaan	Bersifat lokal dan sporadis; belum terintegrasi ke ekosistem keteladanan dan asesmen.
Lintas-tema: Muatan nilai (celah riset)	Riset didominasi kejujuran dan tanggung jawab; kesederhanaan nyaris terabaikan padahal keserakahan adalah akar korupsi.	Poros Nilai Kesederhanaan (komponen kebaruan)	Kesederhanaan sulit dikuantifikasi dan kurang kasatmata sehingga jarang diajarkan secara terstruktur.
Lintas-tema: Asesmen (celah riset)	Evaluasi didominasi domain kognitif (pre-test/post-test) dan belum mengukur perubahan perilaku.	Asesmen Perilaku Lintas Ruang (komponen kebaruan)	Asesmen perilaku dianggap sulit distandardisasi dan berisiko menambah beban administratif guru.

b. Pembahasan

Titik Temu (Kesepakatan) dan Friksi Akademis (Perdebatan)

Konstelasi literatur dalam diskursus pendidikan antikorupsi tingkat dasar ini merepresentasikan dialektika yang dinamis. Terdapat konvergensi gagasan yang membentuk konsensus akademis yang solid, namun diiringi dengan divergensi yang menciptakan friksi dan perdebatan substansial pada tataran implementasi praksis. Titik temu pertama yang disepakati secara aklamasi oleh seluruh peneliti adalah imperatif kronologis: pendidikan antikorupsi wajib diinisiasi sedini mungkin (di tingkat sekolah dasar). Hal ini tidak dapat ditawar karena pada fase inilah struktur kepribadian dan kompas moral anak mulai membeku menjadi identitas permanen (Suleman dkk., 2025). Kedua, sebagaimana dielaborasi pada tema sebelumnya, mayoritas mutlak literatur sepakat bahwa strategi inklusif yakni menyelipkan nilai antikorupsi sebagai *hidden curriculum* atau mengintegrasikannya ke dalam silabus PPKn dan PAI adalah jauh lebih superior dibandingkan memaksakannya sebagai muatan lokal eksklusif (Siswanti, 2017). Ketiga, para akademisi berkonvergensi pada kesimpulan bahwa keberhasilan program integritas ini sepenuhnya bergantung pada sinergi trisentris yang harmonis: keterlibatan aktif dan linier antara otoritas sekolah (guru/kepala sekolah), unit keluarga (pengasuhan orang tua), dan lingkungan sosiokultural masyarakat (Yorman dkk., 2025). Konstruksi moral apa pun yang dibangun dengan susah payah oleh guru di sekolah akan terdisintegrasikan seketika apabila

orang tua di rumah secara sadar membenarkan perilaku manipulatif pragmatis atau mempertontonkan gaya hidup konsumtif-koruptif (Sakban dkk., 2025).

Di luar konsensus tersebut, korpus literatur diwarnai oleh perdebatan krusial yang mengindikasikan krisis paradigma. Perdebatan paling tajam terpusat pada sistem evaluasi, metrik asesmen, dan validitas pengukuran integritas. Sejumlah kajian kritis, seperti yang disuarakan oleh Yasmiati dkk. (2025), menyerang keras fakta bahwa evaluasi keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah saat ini masih didominasi dan terjebak pada penilaian domain kognitif (ujian tertulis pilihan ganda atau esai) yang sangat artifisial. Mengevaluasi kedalaman integritas seorang anak semata-mata dari kemampuannya mendefinisikan pasal korupsi di atas kertas dianggap sebagai sebuah oksimoron pedagogis yang fatal. Sebagai solusinya, kelompok peneliti progresif mendesak transisi menuju instrumen evaluasi holistik yang melibatkan rubrik observasi perilaku, portofolio rekam jejak karakter, serta penilaian sejawat (*peer assessment*) lintas waktu (Yasmiati dkk., 2025). Namun, di kubu yang berseberangan, para praktisi pendidikan mendebat bahwa metode asesmen kualitatif multidimensi semacam itu sangat ilusif, tidak pragmatis, sangat menyita waktu, dan terlampau sulit distandardisasi mengingat tingginya rasio siswa per guru serta menumpuknya beban administratif instruksional yang ada (Yasmiati dkk., 2025).

Area perdebatan kedua yang tidak kalah pelik menyangkut kompetensi pedagogis versus realitas keteladanan pendidik. Secara teoretis, seluruh literatur klasik memuja keteladanan sebagai variabel independen terpenting. Akan tetapi, studi empiris kuantitatif berskala masif yang mengevaluasi secara riil profil integritas pendidikan justru menyingkap anomali sosiologis yang menohok: tingkat perilaku kejujuran yang ditunjukkan oleh siswa di level akar rumput sering kali secara statistik lebih baik dan murni dibandingkan dengan profil keteladanan dan transparansi yang dipertontonkan oleh kepala sekolah maupun tenaga kependidikan (Zulaiha dkk., 2025). Banyak siswa mengalami kebingungan moral (disorientasi etis) ketika di satu sisi mereka diceramahi tentang kejujuran, namun di sisi lain menyaksikan secara langsung guru mereka menoleransi tindakan mencontek massal demi menjaga prestise sekolah, menerapkan favoritisme dalam penilaian, atau sekolah melakukan maladministrasi dana pendidikan (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2026). Fakta ini melahirkan perdebatan sengit: apakah logis membebaskan target pencapaian kurikulum antikorupsi kepada peserta didik apabila belum ada pembenahan integritas aparatur birokrasi sekolah secara radikal terlebih dahulu?

Dominasi Teoretis: Kesenjangan Antara Konsepsi Lickona dan Realitas Bandura

Untuk menjawab diskursus sentral tinjauan pustaka ini mengenai kerangka teoretis mana yang lebih dominan dalam membedah lanskap pendidikan antikorupsi di Indonesia analisis menyimpulkan bahwa Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura dan Kerangka Pendidikan Karakter (*Character Education Framework*) dari Thomas Lickona mendominasi literatur secara absolut, namun keduanya beroperasi pada domain ontologis dan fase implementasi yang bertolak belakang. Kerangka arsitektur Thomas

Lickona diidentifikasi sangat dominan, absolut, dan tak tergantikan dalam ranah perancangan struktur, desain instruksional, dan penetapan tujuan kurikuler. Sebagian besar literatur yang melakukan rekayasa integrasi nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran PPKn atau PAI nyaris secara eksklusif meminjam taksonomi tritunggal Lickona (*Moral Knowing, Moral Feeling, Moral Action*) sebagai *blueprint* capaian pembelajaran (Nurwahyuni dkk., 2026). Teori Lickona menyediakan metrik rasional bagi para guru: bahwa kelas antikorupsi harus dimulai dengan mendistribusikan pemahaman teoretis mengenai korupsi (kognisi), dilanjutkan dengan merangsang empati melalui studi kasus atau *storytelling* (afeksi), dan harus bermuara pada simulasi proyek perilaku (aksi) (Latifah dkk., 2026). Dalam diskursus normatif dan penyusunan silabus di atas kertas, teori Lickona adalah pemenang tunggal. Akan tetapi, ketika analisis literatur bergeser dari ruang hampa teori kurikulum menuju evaluasi realitas lapangan, patologi sistem, dan analisis kausalitas mengenai mengapa luaran karakter siswa sering meleset, Teori Pembelajaran Sosial dari Albert Bandura tampil mengambil alih sebagai kerangka penjas yang jauh lebih mendominasi, presisi, dan kritis. Perilaku koruptif, dalam ekstrapolasi sosiologisnya, bukanlah penyakit kognitif akibat kebodohan intelektual, melainkan produk dari peniruan interaksi sosial yang terlegitimasi dan ternormalisasi oleh budaya lingkungan sekitarnya. Bandura secara akurat membongkar misteri mengapa konsepsi ideal Lickona sering kali rontok secara tragis di fase eksekusi *Moral Action*.

Meskipun siswa secara intelektual sangat menguasai materi bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*moral knowing*) dan secara afektif mampu mengutuk penderitaan kemiskinan (*moral feeling*), mereka terbukti akan tetap dengan mudah merasionalisasi dan mempraktikkan kecurangan berskala mikro (seperti plagiarisme karya teman atau menyontek massal) apabila mereka mengobservasi bahwa lingkungan di sekitar mereka baik itu teman sebaya yang dominan maupun figur otoritas guru membiarkan atau bahkan melakukan penyimpangan yang sama tanpa diganjar sanksi yang berarti (Fajar & Muriman, 2018). Hukum kausalitas dari *triadic reciprocal determinism* dan mekanisme *modeling* dari Bandura memberikan pisau bedah yang sangat tajam untuk menyimpulkan bahwa: dalam pendidikan antikorupsi, arsitektur kurikulum kognitif secanggih apa pun niscaya akan mengalami kolaps di hadapan realitas keteladanan sosial yang hipokrit. Oleh sebab itu, dalam konteks membongkar mekanisme sosiologis mengenai parameter keberhasilan atau kegagalan laten internalisasi integritas terutama di sebuah negara dengan indeks preseden korupsi yang memprihatinkan paradigma determinisme sosial Bandura menawarkan daya kritis yang lebih dominan, radikal, dan berpijak pada realisme psikologis dibandingkan idealisme struktural Lickona (Sambu & Chiroma, 2020).

Identifikasi Celah Penelitian (*Research Gap*) dalam Literatur Eksisting

Kendati diskursus publikasi mengenai pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah dasar telah mengalami eskalasi kuantitatif yang mengesankan dalam satu dekade terakhir, proses sintesis kualitatif yang mendalam ini berhasil mendeteksi sejumlah celah penelitian (*research gaps*) yang bersifat fundamental, yang hingga kini belum tersentuh atau masih sangat lemah elaborasinya dalam korpus literatur yang ada:

1. Marjinalisasi Nilai "Kesederhanaan" (*Simplicity*) sebagai Antitesis Sentral dari Materialisme

Tinjauan literatur membuktikan adanya bias fokus yang sangat ekstrem; sebagian besar riset dan desain program intervensi secara obsesif hanya berfokus pada penanaman indikator nilai "Kejujuran" dan "Tanggung Jawab" (Latifah dkk., 2026). Sayangnya, pendekatan ini mereduksi anatomi psikologis korupsi. Secara epistemologis dan kriminologis, tindakan korupsi pada para elite bukan lahir dari ketidakmampuan berkata jujur secara absolut, melainkan berakar pada dorongan keserakahan (*greed*), patologi hedonisme, glorifikasi status sosial, dan tuntutan gaya hidup materialistis yang tak berkesudahan (Sakban dkk., 2025). Sangat minim ditemukan literatur yang secara spesifik mendedikasikan penelitiannya untuk mengukur efektivitas intervensi pedagogis dalam menanamkan nilai "Kesederhanaan" (*simplicity* atau gaya hidup anti-materialism) pada struktur kognitif anak-anak usia dasar (Sakban dkk., 2025). Pengabaian sistematis terhadap dimensi kesederhanaan ini menyebabkan program pendidikan antikorupsi kehilangan senjata utamanya untuk mengamputasi sel kanker penyakit korupsi tepat pada akar psikologisnya.

2. Kevakuman Instrumen Asesmen Perilaku Lintas Ruang yang Komprehensif

Menyambung perdebatan akademis yang telah diuraikan, literatur masih sangat miskin dalam merumuskan dan menguji coba kerangka operasional empiris mengenai bagaimana sekolah harus memvalidasi dan mengukur integritas siswa sekolah dasar secara multidimensi, tanpa harus membunuh para guru dengan tumpukan birokrasi administratif (Yasmiati dkk., 2025). Absennya instrumen yang *scientifically proven* ini membuat evaluasi program di banyak sekolah tetap mengandalkan peningkatan skor *pre-test* dan *post-test* kognitif (Wingkolatin dkk., 2026). Dalam lensa sosiopsikologis, mengukur moralitas melalui objektivitas kertas ujian adalah sebuah cacat parameter (*flawed metric*).

3. Kesenjangan Rekayasa Relasi Ekosistem Keluarga dan Sekolah

Teori Bandura menitikberatkan secara mutlak bahwa efikasi pemodelan perilaku mengharuskan adanya konsistensi lintas batas ekosistem anak (sekolah, rumah, komunitas). Hampir seluruh literatur merekomendasikan klise normatif berupa "pelibatan orang tua", akan tetapi, sangat langka ditemukan studi yang menyajikan analisis empiris tajam atau mendesain model teknis tentang bagaimana menyeimbangkan ekspektasi moral di sekolah dengan pengawasan pembiasaan di dalam keluarga secara *real-time* (Nurwahyuni dkk., 2026). Dinamika psikologis, gesekan

moral, atau benturan nilai yang terjadi antara keluarga dengan paradigma pragmatis vis-a-vis sekolah yang menerapkan standar integritas idealis nyaris belum dieksplorasi secara sosiologis di literatur nasional.

Kebutaan terhadap Tantangan Etika Integritas di Era Digital: Di saat literatur bangga menyoroti penggunaan media digital mutakhir (aplikasi, animasi, dan kuis online) sebagai instrumen pengantar pembelajaran, secara paradoksal, sangat jarang literatur yang menyentuh bahaya koruptif dari lingkungan digital itu sendiri bagi anak sekolah dasar. Konsep pendidikan antikorupsi belum secara serius mengelaborasi tantangan *digital ethics* masa kini, seperti menormalisasi pencurian hak cipta digital (*plagiarisme copy-paste* informasi internet), pembajakan perangkat lunak, hingga paparan terhadap budaya pamer kekayaan (*flexing*) yang dikonsumsi anak-anak melalui media sosial harian mereka (Izzati dkk., 2019).

Kontribusi Konseptual dan Kebaruan (*Novelty*) Artikel

Artikel ini disusun bukan semata-mata sebagai etalase yang merangkum kembali temuan-temuan masa lalu yang berserakan, melainkan diproyeksikan untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi kembali paradigma implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar. Artikel ini secara strategis mengisi kesenjangan penelitian (*research gaps*) yang telah diidentifikasi dengan memajukan serangkaian kontribusi konseptual yang diklaim sebagai kebaruan (*scientific novelty*) penelitian. Pertama, Reorientasi Poros Nilai. Dari Hegemoni Kejujuran menuju Primasi Kesederhanaan dan Sikap Anti-Keserakahan. Artikel ini menawarkan argumentasi kebaruan paradigmatis bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi di jenjang dasar tidak boleh lagi hanya membeo pada repetisi nilai kejujuran semata, melainkan harus secara radikal merestrukturisasi hierarki nilainya dengan mengangkat indikator "Kesederhanaan" dan "Sikap Cukup" (*contentment*) sebagai tameng utama anti-materialisme. Menggunakan fondasi teori Lickona, pengkondisian Moral Feeling siswa harus ditransformasikan tujuannya; mereka tidak hanya sekadar dirangsang agar merasa bersalah ketika mengucapkan kebohongan, tetapi juga dididik untuk merasa memiliki martabat diri yang cukup dengan apa yang ada, merasa malu untuk menuntut konsumerisme yang berlebihan, dan membenci glorifikasi hedonisme sejak dini. Memanfaatkan kearifan lokal Nusantara (seperti pemaknaan dongeng fabel lokal tentang sifat anti-serakah, maupun penggalan profil tokoh sejarah bangsa yang bersahaja), narasi pendidikan harus mematikan obsesi buta terhadap akumulasi materi tanpa batas, yang terbukti secara klinis merupakan trigger eksistensial utama perilaku korupsi (Sakban dkk., 2025).

Kedua, Sintesis Teoretis Bandura-Lickona. Rekonstruksi "Model Ekosistem Integritas Tripusat". Sebagai sumbangsih kebaruan dalam arsitektur teoretis, artikel ini mengklaim bahwa model Lickona (*Knowing-Feeling-Action*) merupakan instrumen yang impoten jika ia dibiarkan beroperasi di ruang sosial yang hampa, dan secara deterministik akan selalu kolaps jika dihantam oleh realitas pemodelan (*modeling*) yang cacat ala Bandura. Merespons

kelemahan ini, artikel ini memformulasi sintesis organik dari kedua entitas teori tersebut ke dalam sebuah kerangka desain konseptual baru yang dinamakan "Model Ekosistem Integritas Tripusat". Kerangka operasional model ini memberikan ultimatum sistemik: sebelum beban instruksional antikorupsi diinjeksikan secara kurikuler ke dalam batok kepala siswa (berbasis struktur Lickona), institusi sekolah harus melakukan audit internal untuk memastikan sterilitas ekosistem manajerialnya dari setiap bentuk praktik maladministrasi (dari pihak pimpinan hingga pendidik). Lebih jauh, sekolah diwajibkan untuk mengonstruksi sebuah instrumen "pakta integritas kultural" yang mengikat komitmen orang tua siswa guna menjamin adanya konsistensi pemodelan perilaku (*modeling*) tanpa henti di ranah domestik (berbasis mekanisme Bandura) (Zulaiha dkk., 2025). Transformasi asupan kognitif menjadi tindakan moral (*moral action*) hanya dapat direalisasikan jika ia diinkubasi di dalam lingkungan sosial holistik yang memang secara mutlak mensyaratkan, melindungi, dan menghargai nilai integritas tersebut.

Ketiga, Formulasi Desain Asesmen Perilaku Lintas Ruang (*Cross-Spatial Behavioral Assessment*). Merespons kebutaan metodologis terhadap metrik evaluasi pendidikan moral yang selama ini hanya mengabdikan pada ranah kognitif artifisial, artikel ini memelopori gagasan konseptual yang mengadvokasi pergeseran radikal metode asesmen antikorupsi di tingkat dasar. Evaluasi keberhasilan pendidikan antikorupsi dituntut untuk melepaskan diri dari hegemoni kertas ujian, dan beralih sepenuhnya pada portofolio pengamatan perilaku keseharian komprehensif. Instrumen ini tidak hanya merekam ketaatan instruksional siswa dari pandangan guru di sekolah, tetapi secara inovatif menyertakan sistem *peer assessment* (penilaian silang antarteman sejawat) yang dimodifikasi bahasanya agar kompatibel dengan psikologi anak SD. Di samping itu, instrumen ini juga mengintegrasikan rubrik umpan balik kuantitatif-kualitatif berbasis observasi orang tua di rumah secara periodik, yang secara spesifik memantau habituasi pembentukan tanggung jawab mandiri anak, penolakan anak terhadap privilese yang bukan haknya, serta konsistensi sikap anti-curang.

Melalui artikulasi ketiga klaim kebaruan ini, artikel ini tidak sekadar bermaksud memperkaya tumpukan literatur diskursus akademis dalam rumpun keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, melainkan secara ambisius berupaya menyediakan landasan pijak filosofis sekaligus resep praksis bagi para perancang kebijakan struktural (baik pada otoritas Kementerian Pendidikan, lembaga anti-rasuah KPK, maupun pimpinan otonomi sekolah daerah) untuk menyusun ulang desain intervensi pendidikan antikorupsi yang terbukti jauh lebih presisi, adaptif secara penetrasi sosiokultural, dan memiliki kekebalan (*resilience*) yang tinggi terhadap godaan hipokrasi birokratis.

Penguatan Argumen Nilai Kesederhanaan sebagai Antitesis Kesenakanaan

Penegasan kembali nilai kesederhanaan menuntut argumentasi yang lebih kuat daripada sekadar mencantulkannya sebagai nilai tambahan. Secara kriminologis, korupsi

pada banyak kasus tidak bersumber dari ketidaktahuan pelaku tentang arti kejujuran, melainkan dari keserakahan (*greed*) dan tuntutan gaya hidup materialistis yang tidak terbatas (Sakban dkk., 2025). Implikasinya, kurikulum yang hanya menargetkan kejujuran dan tanggung jawab sesungguhnya bekerja pada gejala, sementara akar motivasionalnya, yakni hasrat akumulatif terhadap materi, dibiarkan utuh. Di sinilah kesederhanaan memperoleh posisi sentral: ia bukan nilai pelengkap, melainkan antitesis langsung terhadap akar psikologis korupsi. Perlu ditegaskan bahwa kesederhanaan yang dimaksud bukanlah kemiskinan atau larangan kepemilikan, melainkan sikap cukup (*contentment*) dan martabat diri yang tidak ditentukan oleh akumulasi materi. Dengan perbedaan ini, kesederhanaan dapat diajarkan secara afirmatif, bukan sebagai pembatasan yang menekan, melainkan sebagai bentuk harga diri.

Dalam kerangka Lickona, penanaman kesederhanaan terutama bekerja pada ranah *moral feeling*. Tujuan pengondisian afektif tidak berhenti pada rasa bersalah ketika berbohong, tetapi diperluas hingga tumbuhnya rasa cukup, rasa malu terhadap konsumerisme berlebihan, dan penolakan terhadap glorifikasi kemewahan sejak dini (Latifah dkk., 2026). Dalam kerangka Bandura, kesederhanaan menuntut keteladanan konkret: guru dan orang tua yang tidak memamerkan kemewahan menjadi model perilaku yang memungkinkan anak meniru pola hidup bersahaja. Secara pedagogis, nilai ini dapat dioperasionalkan melalui pemaknaan cerita rakyat dan profil tokoh bangsa yang hidup sederhana, refleksi atas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta pembiasaan menolak privilese yang bukan haknya. Marjinalisasi nilai ini dalam literatur dapat dipahami karena kesederhanaan lebih sulit dikuantifikasi dan kurang kasatmata dibandingkan kejujuran yang dapat diamati melalui perilaku menyontek; namun justru kesulitan pengukuran itulah yang seharusnya mendorong, bukan menghentikan, pengembangan instrumen asesmen yang lebih peka terhadap dimensi gaya hidup.

Keterbatasan Model dan Prasyarat Keberhasilan Implementasi

Sebagai sebuah proposisi konseptual, Model Ekosistem Integritas Tripusat memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, model ini belum diuji secara empiris; ia merupakan hasil sintesis teoretis terhadap literatur, sehingga klaim efektivitasnya masih bersifat hipotetis dan memerlukan validasi melalui penelitian lapangan. Kedua, komponen pakta integritas kultural mengandaikan kesediaan dan kapasitas keluarga untuk menjadi mitra pemodelan; asumsi ini rapuh pada konteks keluarga yang tidak kooperatif, memiliki keterbatasan literasi, atau justru mempertontonkan nilai yang bertentangan dengan integritas. Ketiga, asesmen perilaku lintas ruang yang diadvokasikan menuntut sumber daya, waktu, dan koordinasi lintas pihak yang besar, sehingga berisiko menambah beban administratif guru, yaitu persoalan yang justru dikritik dalam literatur asesmen (Yasmiati dkk., 2025). Keempat, model ini sangat bergantung pada integritas birokrasi sekolah; apabila audit internal sekolah hanya bersifat

formalitas, keseluruhan ekosistem nir-hipokrisi yang menjadi inti model akan kehilangan fondasinya.

Pengakuan atas keterbatasan tersebut sekaligus menerangi kondisi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan model. Model ini berpeluang berhasil ketika tiga prasyarat terpenuhi secara simultan, yaitu adanya komitmen integritas yang tulus dari pimpinan dan pendidik sekolah (bukan sekadar kepatuhan administratif), keterlibatan keluarga yang konsisten dengan nilai yang diajarkan di sekolah, serta dukungan kebijakan yang menyediakan ruang, pelatihan, dan instrumen asesmen yang sederhana namun sah. Sebaliknya, model ini cenderung gagal apabila diterapkan secara parsial, misalnya ketika sekolah menuntut kejujuran siswa tetapi membiarkan maladministrasi pada tingkat manajerial (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2026), atau ketika pelibatan keluarga berhenti pada imbauan normatif tanpa mekanisme yang operasional (Nurwahyuni dkk., 2026). Dengan demikian, kekuatan utama model ini, yakni sifatnya yang sistemik dan saling terkait, sekaligus menjadi titik rentannya: kegagalan pada satu pusat dapat meruntuhkan efektivitas keseluruhan. Oleh sebab itu, model ini sebaiknya diposisikan sebagai kerangka kerja yang menuntut kesiapan ekosistem, bukan resep instan yang dapat diterapkan seragam pada semua konteks sekolah.

Implikasi bagi Praktik PPKn di Sekolah Dasar dan Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Temuan sintesis ini memiliki implikasi langsung bagi praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar. Sebagai mata pelajaran yang berporos pada pembentukan warga negara, PPKn berada pada posisi paling strategis untuk menerjemahkan model ini ke dalam praktik kelas. Implikasi pertama, guru PPKn perlu menggeser penekanan dari sekadar transfer pengetahuan kewarganegaraan menuju fasilitasi pengalaman moral, misalnya melalui dilema etis kontekstual, proyek pembiasaan integritas, dan refleksi atas perilaku sehari-hari di sekolah. Implikasi kedua, ruang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka dapat dimanfaatkan sebagai wahana lintas disiplin untuk mempraktikkan integritas secara nyata, bukan sekadar mempelajarinya (Yasmia dkk., 2025). Implikasi ketiga, guru PPKn dituntut menjadi teladan integritas yang konsisten, sebab dalam kerangka pembelajaran sosial, keteladanan pendidik justru menjadi kurikulum yang paling kuat terbaca oleh peserta didik.

Lebih jauh, pembentukan warga negara berintegritas melalui pendidikan antikorupsi sejalan secara langsung dengan sasaran Profil Pelajar Pancasila. Nilai kejujuran dan kesederhanaan berkelindan dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, khususnya akhlak terhadap diri sendiri; kemandirian dan penolakan terhadap jalan pintas memperkuat dimensi mandiri; sementara kepedulian, keadilan, dan kesadaran bahwa antikorupsi merupakan kepentingan bersama menguatkan dimensi bergotong royong dan bernalar kritis. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak berdiri terpisah dari agenda kurikulum nasional, melainkan menjadi salah satu jalur

konkret untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Rantai logis yang ditawarkan kajian ini, yaitu dari internalisasi nilai antikorupsi menuju pembentukan warga negara berintegritas dan akhirnya perwujudan Profil Pelajar Pancasila, menempatkan PPKn bukan sekadar sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai poros pembentukan karakter kebangsaan yang utuh.

E. Kesimpulan dan Implikasi

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di tingkat formatif sekolah dasar merepresentasikan episentrum pergerakan dan fondasi paling krusial bagi proyek restorasi peradaban bangsa dalam upaya memutus secara permanen rantai regenerasi budaya koruptif di Indonesia. Melalui metode tinjauan pustaka kualitatif komprehensif yang diadaptasi dari struktur sistematis PRISMA, analisis ini menemukan bahwa tingkat efektivitas penanaman nilai-nilai integritas fundamental sama sekali tidak dapat dicapai jika institusi pendidikan masih berlandung di balik pendekatan instruksional kognitif yang mekanis, birokratis, dan terisolasi. Peningkatan signifikansi moral peserta didik hanya terwujud secara nyata apabila dilakukan melalui strategi integrasi inklusif lintas mata pelajaran (dengan menjadikan mata pelajaran PPKn, PAI, dan inovasi proyek Kurikulum Merdeka sebagai lokomotif utama), penguatan masif budaya sekolah berbasis pembiasaan (seperti inisiatif Kantin Kejujuran dan ekstrakurikuler yang mendorong kemandirian dan kolaborasi kerakyatan), serta eksekusi intervensi menggunakan pemanfaatan instrumen media edukasi digital masa kini yang disinergikan secara apik dengan kearifan lokal (*local genius*) seperti Folklore atau filosofi etis daerah guna mengkontekstualisasikan kedalaman moral yang mudah diresonansikan ke alam berpikir anak. Dalam menengahi kompleksitas diskursus teoretis para akademisi, sintesis terhadap himpunan literatur secara jelas mengonfirmasi adanya garis demarkasi dominasi antara dua raksasa teori. Kerangka Pendidikan Karakter holistik yang dicetuskan oleh Thomas Lickona (dengan arsitektur bertingkat Moral Knowing, Moral Feeling, dan *Moral Action*) menancapkan dominasi supremasinya tanpa tanding dalam area perancangan desain konseptual, penataan struktur instruksional, serta penyusunan peta panduan target pencapaian kurikulum pendidikan antikorupsi. Namun demikian, eskalasi realitas sosial yang tercermin dalam literatur justru memperlihatkan bahwa Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura memegang dominasi eksplanatori dan kapasitas kritis yang jauh melampaui Lickona ketika kajian tersebut diturunkan ke ranah implementasi praksis, analisis kegagalan sistem, dan kausalitas perilaku. Teori determinisme resiprokal Bandura menelanjangi fakta pahit: bahwa sebaik dan secanggih apa pun arsitektur kognitif dan kurikuler antikorupsi yang dirancang dalam dokumen sekolah, integritas itu dipastikan akan mengalami abrasi psikologis dan hancur lebur apabila tidak didukung oleh validitas keteladanan konkret, otentik, dan non-hipokrit (*modeling*) dari elemen otoritas kunci, yakni para guru, pimpinan manajerial sekolah, dan lingkungan pengasuhan orang tua.

Sebagai muara analisis, kajian multidimensi ini telah berhasil membongkar dan mengidentifikasi celah literatur (*research gap*) serta defisit implementasi yang mengkhawatirkan: di antaranya adalah hegemoni sistem asesmen evaluasi sekolah yang masih semata-mata bersifat kognitif dangkal, terputusnya sabuk transmisi moral antara ekosistem pengawasan sekolah dengan pembiasaan unit keluarga, serta anomali marjinalisasi terhadap nilai "Kesederhanaan" (gaya hidup anti-materialisme) padahal nilai ini sejatinya adalah penawar paling radikal dan antitesis paling langsung dari akar kausalitas sosiopsikologis korupsi, yakni keserakahan (*greed*). Merespons kelompok tersebut, artikel ini mempersembahkan kontribusi inovasi konseptual melalui dua intervensi strategis: menuntut reorientasi mendesak pada anatomi kurikulum untuk memprioritaskan glorifikasi nilai kesederhanaan, serta mengajukan sintesis radikal yang dinamakan "Model Ekosistem Integritas Tripusat". Kerangka konseptual baru ini dengan cermat merekonsiliasi rigiditas strukturalisme kurikuler Lickona dengan kepastian realisme interaksi sosial Bandura. Model ini mendiktekan keniscayaan akan terciptanya sebuah ekosistem pendidikan yang dijamin nir-hipokrisi; sebuah habitat moral di mana perilaku antikorupsi dan integritas kepribadian tidak hanya berakhir sebagai ceramah kelas yang diseminarkan secara formal, tetapi benar-benar dipraktikkan tanpa kompromi, dievaluasi menggunakan instrumen pengukuran perilaku lintas ruang (*cross-spatial behavioral assessment*) yang valid, serta dihargai secara luas oleh struktur sosial budaya di sekitarnya. Melalui pergeseran fundamental inilah, tujuan utopis pendidikan dasar untuk sanggup membangkitkan, melatih, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang imun secara radikal terhadap patologi korupsi bukan lagi menjadi sebuah kemustahilan sejarah.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar menuntut keterpaduan antara desain kurikuler, keteladanan lintas pusat (sekolah, keluarga, dan komunitas), serta asesmen perilaku, bukan penguatan salah satu unsur secara parsial; bagi praktik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hal ini menempatkan guru sebagai teladan integritas sekaligus fasilitator pengalaman moral yang menautkan pendidikan antikorupsi dengan perwujudan Profil Pelajar Pancasila. Di samping kontribusi tersebut, kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu ditegaskan: Model Ekosistem Integritas Tripusat yang diajukan masih berupa proposisi konseptual hasil sintesis teoretis dan belum diuji secara empiris; cakupan korpus terbatas pada 30 artikel terbitan 2016–2026 sehingga tidak menutup kemungkinan adanya temuan relevan di luar rentang waktu dan basis data tersebut; serta sintesis bersifat interpretatif terhadap literatur, bukan pengukuran langsung di lapangan. Atas dasar itu, agenda penelitian mendatang diarahkan pada pengujian empiris model melalui penelitian lapangan dan studi longitudinal, pengembangan serta validasi instrumen asesmen perilaku lintas ruang, penelaahan prasyarat dan kondisi keberhasilan implementasi pada konteks sekolah yang beragam, serta eksplorasi operasionalisasi nilai kesederhanaan dalam pembelajaran. Dengan demikian, kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada

penyediaan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori Bandura dan Lickona sebagai landasan bagi penelitian dan praktik pendidikan antikorupsi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Instilling Anti-Corruption Characters in Civic Education for College Students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53–63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>
- Ambarwati, D., Zahro, K. N., Chotimah, U. K., & Karomah, P. M. (2023). Internalisasi pendidikan antikorupsi berbasis komunitas “pasraman widya saraswati.” *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 294–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/assidanah.v5i2.294-312>
- Anwar, C. (2021). Strategi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Sekolah Dasar. *Journal of Social Science and Education*, 2(2), 195–202. <https://doi.org/10.24014/ejpe>
- Aprilia, N. P., Fakhruddin, A., & Hermawan, W. (2024). The Role of Non-Formal Education in Strengthening Students’ Moral Character. *Journal of Islamic Education Students (JIES)*, 4(2), 326–335. <https://doi.org/10.31958/jies.v4i2.13457>
- Benu, F., Nitte, Y. M., Ch Rakmeni, E., P Bosko, A. J., Hude Kale, Y. S., Ranboki, F., Lumban Gaol, S. D., Moruk, M. D., & Mano Raga, R. J. (2025). Internalisasi Nilai Anti Korupsi Berbasis Aplikasi Educandy Di Sd Inpres Bonen. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 127–130. https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/863#google_vignette
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Budiarta, I. W., Utami, A. A. I. D. A., Sidaryanti, N. N. A., Suastika, I. N., Sanjaya, D. B., Sara, N. K. Y. S., Anantasya, Y. A. D., Maulida, R., Sipayung, M. Y. B., & Yanti, P. R. (2025). Internalization of Pancasila Values through Government Policy in Buleleng Regency. *SHS Web of Conferences*, 221, 1–13. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101002>
- Fahmi, R., Saputra, T., Solehudin, I., Megasari, I. I., & Febrian, A. (2021). The determinant factors in fostering student anti-corruption behavior through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 217–228. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41116>
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education Chairul Muriman. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference*, 650–653. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>
- Hallatu, T. G. R. (2023). Strengthening Anti-Corruption Character Based on Local Wisdom of the Malind Tribe in Elementary School Students. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 6(1), 73–81. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v6i1.51823>
- Hong, Q. N., Fábregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M. P., Griffiths, F., Nicolau, B., O’Cathain, A., Rousseau, M. C., Vedel, I., & Pluye, P. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. *Education for Information*, 34(4), 285–291. <https://doi.org/10.3233/EFI-180221>

- Ishak, I. D. (2019). Anti-Corruption Values Civilization Management Model in the Program of Strengthening Character Education in Public Primary Schools in Gorontalo Regency. *International Journal of Science and Society*, 1(2), 83-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i2.21>
- Izzati, U. A., Bachri, B. S., Sahid, M., & Indriani, D. E. (2019). Character Education: Gender Differences in Moral Knowing, Moral Feeling, and Moral Action in Elementary Schools in Indonesia. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(3), 547-556. <https://doi.org/10.17478/jegys>
- Kertih, W., Gede, I., Wesnawa, A., Sriartha, I. P., & Maryati, T. (2021). Empowerment of Balinese Local Wisdom and Important Elements of Community Life as Learning Sources in of IPS SMP/MTs in Buleleng Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 169-172. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.211222.027>
- Latifah, A., Premitha, S., & Puspita, S. (2026). Menanamkan Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 106-113. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42102>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mahardika, B. I., Natasya, V. A., Rohmah, P. M. A., Kurniasari, A. N., & Hadi, F. R. (2025). Kantin kejujuran sebagai sarana menumbuhkan sikap kejujuran sejak dini. *Penguatan Kampus Berdampak: Sinergi Akademik dan Sosial dalam Pendidikan Dasar*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/KID>
- Mahmuddah, S. S., & Junaidi, J. (2025). The Role of Character Education in Elementary Schools in the Digital Era. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 8(1), 84-100. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v8i1.90396>
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewaranegearaan. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewaranegearaan*, 9(1), 9-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v9i1.3718>
- Nurwahyuni, A., Najibah, H., & Maulani, I. (2026). Penguatan Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SD Negeri Kotakulon 1 Bondowoso. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 1229-1238. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.306>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pardini, P., Triyanto, T., & Indriayu, I. (2024). The Connectivity of Anti-Corruption Education with Local Wisdom in Developing Honesty Character in Elementary Schools. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 7(2), 649-653. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i02-29>
- Purnaningtyas, A., & Fauziati, E. (2022). Penerapan Teori Sosial Albert Bandura pada Pembiasaan Pengelolaan Sampah Siswa Sekolah Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2418-2425. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2275>

- Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah, S. (2025). Strengthening the Values of Honesty and Simplicity in Elementary School Children as Anti-Corruption Role Models. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 423-434. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6880>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, 2(1), 39-49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Sambu, J., & Chiroma, J. (2020). Value-Lased Leadership Towards a Sustainable Pedagogy in Kenya: Assessing Implications for Schooling in Kenya. Dalam *Discourses on Sustainable Development in Africa* (hlm. 276-292). The Centre for Democracy, Research and Development (CEDRED).
- Sanjaya, D. B., Suartama, I. K., Suastika, I. N., Sukadi, & Mas Dewantara, I. P. (2021). The Implementation of Balinese Follore-Based Civic Education for Strengthening Character Education. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(1), 303-316. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i1.5529>
- Sari, V. K., & Akhwani, A. (2021). Implementation of Character Education Based on Anti-Corruption Values Through Extracurricular and Habituation in Elementary School. *International Conference on Elementary Education*, 2020(1), 153-162. <http://repository.unusa.ac.id/6665/>
- Siswanti, L. (2017). *Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Al-Islamdi SMP Muhammadiyah 1 Gresik* [Universitas Muhammadiyah Gresik]. <http://eprints.umg.ac.id/2753/2/BAB%202.pdf>
- Suastika, I. N., Sidaryanti, N. N. A., Budiarta, I. W., Landrawan, I. W., Adhi Utami, A. A. I. D., Anggita, D. K. S., Ifyani, N., Ariani, N. K. J. W., & Apriani, N. K. (2025). Developing Local genius-Based Nationalism Learning Resources for High School Students in Bali. *SHS Web of Conferences*, 221, 1-8. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101004>
- Sujana, I. P. W. M., Yudana, I. M., Sanjaya, D. B., Kertih, I. W., Yanti, P. D. A., Wijaya, I. P. A. F. P., & Widarma, D. P. P. (2025). Synergy of Balinese Hindu Spiritual Values in Civic Education Learning Materials at Indonesian Higher Education Level. *SHS Web of Conferences*, 221, 1-9. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101005>
- Sukadi, S., & Budiarta, I. (2024). I, We, The People Of Indonesia are Pancasila (A Study of Human Philosophy on the Basis of Unity in Diversity). *Challenges and Opportunities to Local Communities Resilience in Global Change*, 1-13. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2024.2353747>
- Suleman, M. A., Idayanti, Z., Hulkan, M., Siagian, A. A., Rangkuti, K. H., & Putri, N. (2025). Shaping Honest Citizens: Reframing Anti-Corruption Education in Primary Schools for a Culture of Integrity. *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 4(1), 644-658. <https://doi.org/https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v4i1.325>
- Suryaningsih, T., Maksum, A., & Marini, A. (2023). Membentuk profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global melalui pendidikan multikultural di sekolah dasar. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogi*, 7(3), 1027-1042. <https://doi.org/10.20961/jdc.v7i3.79594>

- Suwastika, I. W. K., Srinadi, N. L. P., & Hermawan, D. (2025). Ethics and Anti-Corruption Education A Systematic Review of The Role of Education in Shaping the Integrity of the Young Generation. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 4(2), 101-118. <https://doi.org/10.55927/jiph.v4i2.4>
- U4 Anti-Corruption Resource Centre. (2026, Maret 5). *Education*. <https://www.u4.no/topics/education/basics>
- Ugalde, Luis., Barros, Nicholas., McLean, G. F., & Ready, T. (1998). *Love as the foundation of moral education and character development : a Latin American contribution for the 21st century*. Council for Research in Values and Philosophy.
- Wingkolatin, W., Aprijane A, K., Rintaningrum, R., Pradana, M., Nuswantara, K., & Dewi, D. A. (2026). Strengthening Students' Academic Ethics Through a Digital Citizenship-Based Social Education Model. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 8(1), 834-853. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v8i1.8919>
- Yasmianti, N. L. W., Lasmawan, I. W., Suharta, I. G. P., & Widiani, I. W. (2026). The Implementation of the Merdeka Curriculum and Its Implications for the Internalization of Anti-Corruption Values Among Students. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 18(1), 207-218. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v18i1.7403>
- Yasmianti, N. L. W., Parwata, I. G. L. A., Ratnaya, I. G., & Budhayani, I. D. A. M. (2025). Measuring Integrity: How Should Anti-Corruption Education Assessment be Conducted in Schools? *SHS Web of Conferences*, 221, 1-7. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103019>
- Yorman, Y., Suwarni, S., & Jalaludin, S. (2025). Internalisation of Anti-Corruption Education Values in Public Elementary Schools in Mataram City, Indonesia. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 5(3), 541-557. <https://doi.org/10.47134/ijsl.v5i3.434>
- Zulaiha, A. R., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2025). The Effect of Anti-Corruption Character Education on Educational Integrity. *Inovasi Kurikulum*, 22(1), 133-146. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126>